

**KONSEP THOMAS HOBBESTENTANG CIVIL SOCIETY  
(Suatu Tinjauan Filsafat Sosial)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)  
Ilmu Ushuluddin



PUSHTAKAAN	
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURABAYA	
No. KLAS U-2001 03A AF	No. PTG U/2001/AF/03A
JAFAL BUKU:	
TANGGAL :	

Oleh :

**SUYATMI**  
NIM : EO.1.3.96.188

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS USHULUDDIN  
JURUSAN AQIDAH FILSAFAT  
2001**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh **Suyatmi** ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Surabaya, 26 Juli 2001

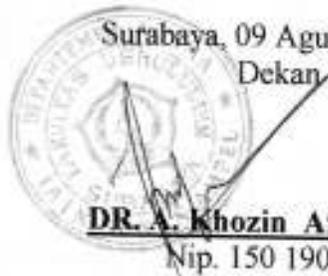
Pembimbing,



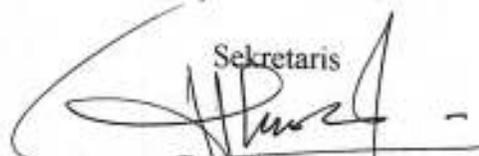
**DR. A. Khozin Afandi, MA**  
Nip. 150.190.692

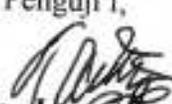
## PENGESAHAN TIM PENGUJI

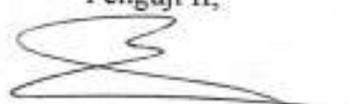
Skripsi yang disusun oleh **Suyatmi** ini telah dipertahankan  
di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 09 Agustus 2001  
Dekan  
  
**DR. A. Khozin Afandi, MA**  
Nip. 150 190 692

Ketua  
  
**Drs. Mahmud Manan, MA**  
Nip. 150 177 773

Sekretaris  
  
**Drs. Tasmuji**  
Nip. 150255397

Penguji I,  
  
**Drs. Cahyo P**  
Nip. 150013756

Penguji II,  
  
**Drs. H. M. Achjar**  
Nip. 150 186 637

## ABSTRAKSI

Masalah pokok yang dibahas dalam skripsi yang berjudul "KONSEP THOMAS HOBBS TENTANG CIVIL SOCIETY" (Suatu Tinjauan Filsafat Sosial) ini, adalah : Bagaimana konsep Thomas Hobbes tentang *civil society* ? dan Bagaimana proses terbentuknya *civil society* dalam pandangan Thomas Hobbes ?

Sebagaimana diketahui bahwa Thomas Hobbes adalah filosof Inggris yang lahir pada 3 April 1588 dan meninggal pada tahun 1679. Dalam hidupnya dipenuhi dengan dunia kekerasan yaitu adanya kekacauan, kecemasan, ketakutan dan penuh dengan persaingan dalam merebutkan kekuasaan. Hobbes berusaha mencari solusi untuk mendamaikan keadaan *Homo homini lupus* dan perang semua melawan semua. Dengan metode mekanistik-geometris, Hobbes ingin mendamaikan individu yang saling menanamkan pengaruhnya untuk saling memiliki karena tidak adanya aturan hukum yang menghambat kebebasan mereka yang mutlak.

Penulisan skripsi ini bersifat kepustakaan maka metode penelitian yang digunakan adalah *metode deskriptif* dengan pendekatan filosofis historis dan komperatif, metode pengumpulan data yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat literatur sesuai dengan sifat penelitian, metode analisis yang dipakai adalah metode analisis hermeneutik, penulis berusaha membahas secara rinci konsep Thomas Hobbes sesuai dengan masalah di atas.

Adapun dari penulisan ini penulis dapat menyimpulkan bahwa *civil society* dalam pandangan Hobbes adalah suatu masyarakat yang aman tentaram dan bahagia dengan undang-undang atau aturan hukum (*civil law*) dan penguasa yang otoriter bukan sewenang-wenang. Sedangankan proses terbentuknya *civil society* adalah dengan adanya tabiat manusia yang dalam *state of nature* selalu cemas dan takut maka mereka berinisiatif untuk berdamai dengan mengadakan kesepakatan atau perjanjian (*covenant*) yang tegas dan dijunjung tinggi oleh pelaku perjanjian yaitu dengan kontrak social yang akan menjadikan *civil society* ke suatu bentuk negara yang aman dan damai.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Penegasan Judul.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II : BIOGRAFI THOMAS HOBBS</b>	
A. Riwayat Hidupnya.....	15
B. Pemikiran dan Latar Belakang Pemikirannya.....	21
C. Latar Belakang Pemikiran Sosial Kemasyarakatan.....	32
D. Karya-karyanya.....	36

**BAB III : KONSEP THOMAS HOBBS TENTANG CIVIL SOCIETY**

A. Pengertian Civil Society..... 41

B. Konsep Thomas Hobbes Tentang Civil Society..... 50

C. Proses Terbentuknya Civil Society Menurut Thomas Hobbes..... 56

1. Karakter Manusia dan Munculnya Negara..... 56

2. Kontrak Sosial..... 60

    a. Pelaku Kontrak Sosial ..... 64

    b. Posisi Rakyat dan Negara dalam Kontrak Sosial ..... 66

    c. Hak dan Kewajiban antara Rakyat dan Negara..... 67

**BAB IV : ANALISA KONSEP THOMAS HOBBS TENTANG CIVIL SOCIETY**

A. Analisa Konsep Thomas Hobbes tentang Terbentuknya Civil Society 70

B. Prosepek Civil Society Thomas Hobbes..... 79

1. Manusia Secara Psikologis..... 79

2. Dari Segi Ciri-ciri Civil Society..... 85

3. Pluralisme Agama..... 88

4. Civil Society dan Piagam Madinah..... 93

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 100

B. Saran ..... 102

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 104

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP** ..... 108

**LAMPIRAN -LAMPIRAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah wacana, *civil society* ( masyarakat sipil ) yang sering disepadankan dengan masyarakat madani, telah menarik perhatian semua kalangan baik dari pemerintah maupun akademisi. Topik ini tidak kunjung selesai untuk dibicarakan, salah satu penyebabnya adalah karena yang menjadi objek dan subjek adalah manusia di dalam masyarakat itu sendiri.

Untuk membangun *civil society*, bukan suatu hal yang begitu mudah untuk dilakukan. Karena masyarakat terbentuk dari individu-individu yang mempunyai motivasi berbeda-beda dan akan mengalami perubahan perilaku dan berfikirnya (socio-budaya) setiap saat. Lain halnya dengan hewan, misalnya semut, terbentuk masyarakat semut karena dorongan naluri saja, sehingga tidak akan berubah walaupun lingkungan mengalami perubahan.

Tiap masyarakat dalam perjalanan hidupnya selalu mengalami perubahan. Perubahan itu ada yang kentara sekali, ada yang tidak begitu menarik perhatian, ada yang pengaruhnya luas, ada yang terbatas, ada yang bersifat evolusi dan ada pula yang revolusi.<sup>1</sup> Interaksi dengan lingkungan mempunyai pengaruh yang

---

<sup>1</sup> Sidi Gazalba, *Islam dan Perubahan Sosio Budaya Kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat* (Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1983) 15.

signifikan terhadap perilaku dan pola berpikir. Sehingga untuk mewujudkan *civil society*, semua tokoh pemikir besar merumuskan teori sosialnya dengan acara melakukan pengamatan terhadap kondisi sosial sekitarnya.

Sebagai sebuah konsep, *civil society* berasal dari proses sejarah Barat. Akar perkembangan dapat dirunut mulai Cicero (106-43 SM), dan bahkan, menurut Manfred Riendel, lebih ke belakang sampai Aristoteles (384-322 SM). Yang jelas Cicerolah yang memulai menggunakan istilah *societes civilis* dalam filsafat politiknya. Dalam tradisi Eropa sampai abad ke-18 pengertian *civil society* dianggap dengan pengertian negara ( *the state* ), yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Jadi istilah-istilah seperti *komunia politike, societas civilis, societe civile, buergerliche gesellschaft, civil siciety, dan societa civile* dipakai secara bergantian dengan *polis, civitas, etat, staat, dan stato*. Maka J.J. Rousseau menggunakan istilah *societes civile*, ia memahaminya sebagai negara yang mana salah satu fungsinya menjamin hak milik kehidupan dan kebebasan para anggotanya.<sup>2</sup> yang dalam istilah Thomas Hobbes adalah *Commonwealth*. Dalam bahasa latin, *Civitas*.<sup>3</sup>

Thomas Hobbes (1588-1679 ), seorang filsuf di bidang ilmu negara, dalam bukunya *leviathan* ( 1651 ) mengemukakan pendapat bahwa pengalaman emperis

<sup>2</sup> Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta : Pustaka LP3ES, 1996) 1.

<sup>3</sup> Thomas Hobbes, *Leviatan*, Edited by Nelle Fuller da Grear Books iof The Western World,

merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang sah. Menurutnya pengalaman itu masyarakat himpunan individu-individu, yang masing-masing atas cara egoistik mengejar kepentingan mereka sendiri. Akibatnya adalah "perang semua melawan semua", keadaan *homomini lupus* dan rasa takut. Kalau orang mendirikan ikatan sosial itu hanya untuk *case fire* saja. Rasa takut mendorong orang untuk mengusahakan suatu keseimbangan antara mereka. Kalau mereka berhasil dan semua pihak antagonistik menjadi sama kuat, maka muncul suatu koeksistensi yang berdasar kekuatan dan ketakutan.<sup>4</sup>

Tetapi keseimbangan semacam ini tidak dapat diandalkan karena selalu goyah dan penuh bahaya. Sewaktu-waktu seseorang bisa muncul atau suatu peristiwa terjadi yang merusak *ekuilibrium* sosial itu.<sup>5</sup> Dan rasa ketidakamanan muncul dalam tubuh masyarakat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jika melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat, perubahan sosial budaya telah mempengaruhi perilaku dan pola berpikir masyarakat. Budaya kekerasan yang telah tenggelam, kini muncul kembali. Misalnya manusia tidak segan-segan memenggal kepala manusia yang lainnya, membakar manusia hidup-hidup, perang antara agama, perang antara etnis dan perang antara golongan muncul di mana-mana.

---

<sup>4</sup> K.J. Veeger, *Realitas Sosial Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Individu Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993) 68.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 69.

Rakyat sudah tidak menghargai pimpinan, hukum tidak lagi dipatuhi, dan kebebasan bertindak dari masing-masing individu dan kelompok mulai menunjukkan kekuatan sendiri-sendiri dan pelaksanaan hukum tidak lagi berdaya di hadapan pelanggar hukum sehingga hukum rimba berlaku, siapa yang kuat itulah yang menang. Akhirnya perang semua melawan semua terjadi, yang dahulu kawan menjadi lawan dapat dikatakan "manusia adalah serigala di antara sesamanya".<sup>6</sup> sehingga setiap saat manusia menjadi rakus, takut dan terancam.

Oleh karena itulah orang yang menginginkan keadaan damai yang lebih kokoh, bersepakat untuk mengganti keoksistensi tadi dengan hidup bermasyarakat, dimana kekuatan fisik diganti dengan kekuatan hukum. Orang rela menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada kekuasaan negara, supaya menerima dari padanya perlindungan hukum, keamanan dan barang yang dibutuhkan demi perkembangan mereka.<sup>7</sup>

Dengan teori perjanjian, masyarakat diharapkan tercapainya masyarakat sipil yang aman dan bahagia di bawah perlindungan hukum. Sehingga *civil society* yang dalam istilahnya Hobbes adalah persekutuan (*commonwealth*) atau dalam bahasa latin, *Civitas*.<sup>8</sup> Dengan teori perjanjian masyarakat (*social contract, social*

---

<sup>6</sup> M. Husni Putuhena, *Tragedi Kemamusiaan dalam Kerusuhan di Maluku* (Ambon : LEMM, 1999) 35.

<sup>7</sup> K.J. Veeger, *Realitas Sosial*, 69.

<sup>8</sup> Dihar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Bandung : Mizan) 113.

*compact*), dimaksudkan adalah teori yang berusaha menjelaskan asal mula dan sifat negara termasuk pemerintah, yang dianggapnya sebagai hasil perjanjian antara individu-individu yang mendirikan masyarakat dan negara, atau antara warga negara suatu negara dengan pemerintahnya.<sup>9</sup>

Padahal dalam realitasnya masyarakat awal Islam ini sangat ideal untuk dijadikan tauladan dalam kehidupan dalam bernegara dan berbangsa. Oleh karena itu, dijadikan rujukan dalam perumusan konsep teori politik Islam. Masyarakat yang ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme. Banyak kaum orientalis dan modernisasi masyarakat awal Islam, seperti Robert N. Bellah mengatakan bahwa Islam menurut zaman dan tempatnya dahulu (misalnya adanya keterbukaan partisipasi politik, dan kemajemukan masyarakat) adalah sangat modern sehingga gagal.<sup>10</sup> Kegagalan pada periode berikutnya disebabkan karena tidak adanya prasarana sosial di Timur Tengah saat itu yang mendasari dunia di Bagdad.

Abad pertengahan merupakan kemunduran dan kegelapan dunia Barat. Sebaliknya bagi dunia Islam abad pertengahan adalah abad kejayaan dan keemasan. Sangat logis jika perkembangan ilmu politik khususnya teori kontrak

---

<sup>9</sup> Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya* (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1991) 43.

<sup>10</sup> Norcholis Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta : Paramadina, 1999) 32.

sosial dalam dunia Islam telah di rumuskan sejak abad ke-11.<sup>11</sup>

Para tokoh kontrak sosial di dunia Barat di antaranya Plato, Epicurus, Thomas Hobbes, John Lock, J.J.Rousseau dan Imanuel Kant. Semua teori yang dikemukakan oleh para tokoh di atas, umumnya menandakan bahwa hubungan antara pengusaha negara dan yang dikuasai semata-mata dilandasi oleh kesepakatan, baik yang tegas maupun tidak di antara kedua belah pihak yang mana masing-masing masih diikat oleh kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi demi eksistensi negaranya.

Thomas Hobbes berusaha merumuskan teori kontrak sosial dalam membentuk masyarakat sipil yang adil, dan damai atau negara, berangkat dari filsafat manusianya, bahkan manusia adalah organ mekanistik yang harus didamaikan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hobbes memandang fitrah manusia itu adalah bersifat rakus terhadap yang lain (*homo hominini lupus*). Antara manusia yang satu dengan yang lainnya saling menonjolkan kepentingan individualnya. Manusia dengan kemampuan akalnya hanya akan menemukan hukum alam, *Lex naturalis*, hukum alam yang dihasilkan oleh akal bersifat egois, hanya untuk kepentingan pribadinya dan tidak merugikan dirinya sendiri. Sebagaimana dinyatakan dalam Encyclopedia Britannica "A law of nature, *lex naturalis*, is eprecept or general rule, found out by reason by wich a

---

<sup>11</sup> H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara (Sejarah dan Pemikiran)* (Jakarta : UI-Press, 1990) 67.

*man is forbidden to do which is destructive of his life*"<sup>12</sup>.

Dengan akal manusia menyadari untuk kepentingan bersama, dimana setiap orang menonjolkan kepentingan pribadi, diperlukan seorang pemimpin atau raja yang diangkat melalui kontrak sosial, dengan bentuk negara absolutisme dan otoriter sehingga rakyat patuh terhadap negara dan masyarakat aman tenteram dan damai (*civil society*) dapat tercapai.

Berangkat dari latar belakang kehidupan dan teori tentang manusia sampai pada kontrak sosial dan terwujudnya suatu negara, penulis ingin mengetahui konsep Thomas Hobbes tentang *civil society* dan proses terbentuknya *civil society* ditinjau dari filsafat sosial yang berusaha memberikan gambaran menyeluruh tentang gejala sosial (proses sosial) manusia dan menyelidiki hakekat sosial berdasarkan sebab-sebab dan kondisi yang esensial, serta membantu memberikan solusi dalam permasalahan sosial.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep Thomas Hobbes tentang *civil society* ?
2. Bagaimana proses terbentuknya *civil society* dalam pandangan Thomas

---

<sup>12</sup> *Encyclopedia Britannica* (New York, 1986), Twenty-Eight Printing, 86.

Hobbes?

3. Bagaimana pandangan Islam terhadap konsep Thomas Hobbes tentang *civil society*?

### C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan.

#### a. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep Thomas Hobbes tentang *civil society*.
2. Untuk mengetahui proses terbentuknya *civil society* dalam pandangan Thomas Hobbes.
3. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap konsep Thomas Hobbes tentang *civil society*.

#### b. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai urgensi yang signifikan, antara lain sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Yaitu sangat membantu berpikir dalam menemukan teori baru dalam berfilsafat dan menambah literatur dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wacana baru terutama pada fakultas Ushuluddin jurusan Aqidah Filsafat.

#### D. Kajian Pustaka

Sejauh ini dapat dipastikan bahwa karya tulis yang secara khusus membahas persoalan konsep Thomas Hobbes tentang *civil society* (suatu tinjauan filsafat sosial), belum pernah ada. Pembahasan dalam lingkup ini biasanya ditemukan dalam buku-buku lain dan hanya dijelaskan secara garis besar.

Di antaranya ada yang mencantumkan persoalan ini dalam sub pokok bahasan pemikiran tokoh, seperti yang dilakukan oleh Franz Magnis-Suseno dalam bukunya *Filsafat Ilmu Kritis*. Begitu pula dengan bahasan-bahasan yang ada pada karya-karya lain, seperti Harun Hadiwijono dalam bukunya *Sari Sejarah Filsafat Barat 2* dan Tomm Campbell dalam bukunya *Tujuh Teori Sosial*.

Dalam karya Franz Magnis-Suseno dalam sub pokok bahasan, bahwa atas dasar antropologi Hobbes membangun filsafatnya tentang negara sebagai *Leviathan* yang harus mutlak kekuasaannya dan menakutkan karena hanya dengan demikian ia dapat menertibkan manusia dan menjamin suatu kehidupan bersama yang dan dengan demikian bahagia Hobbes bercita-cita untuk mengembangkan suatu filsafat atau teori negara yang dapat membantu untuk menyusun masyarakat dalam keadaan damai dan adil.

Dalam karya Harun Hadiwijono, bahwa menurut tabiatnya segala manusia adalah sama. Dalam keadaan yang alamiah, tiap manusia ingin mempertahankan kebebasannya dan menguasai orang lain. Akibatnya mereka bertengkar, dan pertengkar ini menimbulkan perang total, semua orang

memerangi semua orang. Oleh karena itu untuk terbebas dari bahaya kehancuran, mereka bersatu dan bersama-sama membuat suatu perjanjian (kontrak sosial) sehingga menjadi masyarakat yang dicita-citakan yaitu masyarakat yang aman dan bahagia.

### E. Penegasan Judul

Pembahasan skripsi ini diberi judul: "Konsep Thomas Hobbes tentang *Civil Society* (suatu tinjauan Filsafat Sosial)". Dan judul tersebut terdiri atas empat istilah kunci yang perlu dijelaskan supaya menjadi istilah yang operasional, sehingga memperjelas apa yang dikehendaki penulis. Keempat istilah tersebut adalah: "konsep", "Thomas Hobbes", "*civil society*" dan "filsafat sosial".

Istilah "konsep" dalam bahasa Inggris: "*concept*", dalam bahasa Latin: "*conceptus*", dari *conperere* (memahami, mengambil, menangkap) yang merupakan gabungan dari *con* (bersama) dan *capere* (menangkap, menjinakkan).<sup>13</sup> Konsep adalah kesan mental, suatu pemikiran, ide, suatu gagasan yang mempunyai derajat kekonkritan atau abstraksi, yang digunakan dalam pemikiran abstrak.<sup>14</sup> Jadi konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkrit.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Loren Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1966) 481.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1996) 520.

Tomas Hobbes (1588-1679) adalah filosof Inggris.<sup>16</sup> Teori yang terkenal ialah tentang terjadinya negara mutlak (*absolut*).<sup>17</sup> Karyanya yang terkenal adalah *leviathan*.<sup>18</sup>

Istilah "*civil society*" dari istilah *civil* adalah warga negara, Latin *civilis*<sup>19</sup> warganegara dan *society* adalah masyarakat, suatu kelompok manusia yang menjalin hidup bersama untuk mencapai tujuan bersama yaitu masyarakat yang aman dan sejahtera dan bahagia. *Civil society* adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi bercirikan antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), dan keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.<sup>20</sup> *Civil society* dipandang sebagai bangsa yang dinamis dan serasi dalam perkembangan sosialnya.<sup>21</sup>

Istilah "*filsafat sosial*" dari kata filsafat adalah upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematis serta lengkap tentang seluruh realitas.<sup>22</sup>

Dan sosial adalah hal yang berkenaan dengan perilaku interpersonal atau yang berkaitan dengan proses sosial (*sociat*).<sup>23</sup> Jadi filsafat sosial adalah suatu pemikiran yang berupaya memberikan gambaran menyeluruh tentang gejala sosial

<sup>16</sup> *The Word Book Encyclopedia Vol. 9* (USA : United States, 1986) 241.

<sup>17</sup> *Ensiklopedi Umum* (Yogyakarta : Kanisius, 1991) 415.

<sup>18</sup> *The Word Book Encyclopedia*.

<sup>19</sup> K. Prent C.M dkk, *Kamus Latin Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1969), 140.

<sup>20</sup> Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Sostety*, 3.

<sup>21</sup> Gordon Marsal, *A Dictionary of Sociologi* (New York Oxford University Press) 74.

<sup>22</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, 242.

(proses sosial) manusia. Tugas filsafat sosial yakni menyelidiki hakekatnya sosial berdasarkan sebab-sebab dan kondisi yang *esensial*.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library reserch*) yang di maksud adalah penelitian yang sumber datanya, terdiri atas bahan-bahan yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, surat kabar, majalah, dan yang lainnya. Selain bersifat kepustakaan, penelitian ini bersifat kualitatif, karena data yang dihasilkan bersifat diskriptif.

### a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *filosofis, historis*<sup>23</sup> sesuai dengan sifat permasalahan yang akan dikaji berkaitan data sejarah yaitu latar belakang pemikiran Thomas Hobbes. Pendekatan sejarah yang dimaksudkan untuk menemukan data-data sejarah yang dapat menegakkan fakta-fakta secara obyektif tentang pemikiran Thomas Hobbes tentang *civil society*. Juga menggunakan pendekatan komperatif filosofis melalui pemikiran para filosof sosial (teori-teori yang lain).

### b. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipakai adalah metode analisis *hermenevtika*

---

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung : Alfabeta, 1998) 5.

adalah ” menerangkan apa yang tidak dapat dimengerti atau dipahami dengan cara menerjemahkan ke dalam bahasa yang memang dapat dimengerti”<sup>24</sup> digunakan sebagai cara kita memahami dan menafsirkan sesuatu dipengaruhi oleh konteks historis.<sup>25</sup>

### c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data, untuk melihat pemikiran (konsep) thomas Hobbes tentang *civil society*, penulis berusaha mengumpulkan data (literatur), baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan konsep Thomas Hobbes. Sumber data tersebut dibagi menjadi tiga yakni: sumber data primer yaitu buku-buku yang merupakan karya tokoh yang dibahas. Sumber data sekunder merupakan sumber pendukung yang berupa buku-buku orang lain tentang tokoh yang sedang dibahas. Dan sumber data tertier adalah sumber yang tidak berhubungan langsung dengan tokoh tetapi mendukung penelitian ini.

Adapun sumber-sumber data tersebut adalah :

#### 1. Sumber data primer:

- *Leviathan*, karya Thomas Hobbes.

<sup>24</sup> J.J.J.M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1996) 52.

<sup>25</sup> Sigiono, *Metode Penelitian Administrasi*, 42.

## 2. Sumber data sekunder:

- *Encyclopedia Britannica.*
- *Encyclopedia Americana corporation.*
- *Histry and Philosophy of Social Science.*
- *Tujuh Teori Sosial*, karya Tom Campbell.
- *Pemikiran Politik di Negara Barat*, karya Dilliar Noer.
- *Etika Politik*, karya Franz Magnis-Suseno.
- dan buku-buku lain yang membahas tentang Thomas Hobbes

## 3. Sumber data tertier:

- Buku-Buku lain yang tidak membahas tokoh tetapi teorinya berhubungan dengan teori tokoh yang dibahas dan sifatnya mendukung penulisan skripsi ini.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini, agar terarah dan tersusun dengan rapi, maka penulis menggunakan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

**BAB I** : Merupakan pendahuluan yang berkaitan tentang gambaran umum pola dasar penelitian skripsi yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaannya, kajian pustaka, penegasan judul, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan pembahasan umum tentang Biografi Thomas Hobbes meliputi: Riwayat hidupnya, pemikiran dan latar belakang pemikirannya, latar belakang sosial kemasyarakatan, karya-karyanya.

BAB III : Merupakan obyek pembahasan yang meliputi: Konsep Thomas Hobbes tentang *civil society* di dalamnya terdiri dari pengertian *civil society*, konsep Thomas Hobbes tentang *civil society*, proses terbentuknya *civil society*.

BAB.IV : Merupakan analisa terhadap pembahasan tentang Konsep Thomas Hobbes tentang *civil society* yang meliputi: Analisa konsep Thomas Hobbes tentang *civil society*, prospek *civil society*, *civil society* dan Piagam Madinah.

BABV : Sebagai penutup dari penulisan skripsi ini, yang meliputi kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan skripsi ini dan saran-saran kepada para pembaca atau semua pihak yang berkompeten.

## BAB II

### BIOGRAFI THOMAS HOBBS

#### A. Riwayat Hidup

Thomas Hobbes lahir pada tanggal 3 April 1588 di Malnesbury Wiltshire, Inggris dan meninggal pada tahun 1634. Dia adalah seorang filosof dan ilmuwan Inggris yang mencoba menggunakan ilmu baru pada masanya, guna menggunakan sifat manusia dan masyarakat, kemudian untuk menemukan implikasi-implikasi penemuan baru bagi permasalahan-permasalahan pada masa itu.<sup>1</sup>

Sembilan puluh satu tahun kehidupannya itu mencakup zaman yang paling ganas, paling kejam, dan paling berdarah dalam sejarah Inggris. Waktu Hobbes lahir, Ratu Elisabeth I sibuk menundukkan golongan Katolik dengan kejam. Irlandia dan Skotlandia ditaklukkan. Di bawah pemerintahan raja-raja dari keluarga Stuart yang menggantinya, Inggris semakin terpecah oleh pertentangan antara Gereja Anglikan resmi, kaum puritan, dan Golongan Katolik dan antara dengan parlemen.<sup>2</sup>

Kelahiran Hobbes bersamaan dengan ekspansi yang dilakukan Spanyol ke Inggris. Pada saat itu armada Spanyol mendekati kawasan Inggris. Rasa takut itu makin mencekam dalam diri ibunya Hobbes. Pada saat seperti inilah, Hobbes

---

<sup>1</sup> *The Encyclopedia Americana* vol.-14 (USA : Grolier Incorporated, 1993) 257.

<sup>2</sup> Franz Magnis - Suseno, *Etika Politik* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001) 201.

dilahirkan. Menurut hitungan waktu bagi yang dikandung itu belum waktunya lahir, oleh sebab itu Hobbes dilahirkan ibunya dalam keadaan prematur.<sup>3</sup>

Hobbes dilahirkan dalam keluarga miskin. Ayahnya adalah pendeta yang lekas naik darah dan tak berpendidikan. Ayahnya mengirimkan kepada pamannya yang kaya. Atas bantuan finansial yang diberikan oleh pamannya Hobbes dapat belajar di perguruan tinggi Magdalen Hall, Oxford, tetapi ia merasa bahwa pendidikan di perguruan tinggi ini tidak memberikan manfaat kepadanya. Di dalam *Ensiklopedia Britannica* dijelaskan, bahwa dia masuk di perguruan tinggi Oxford pada usia 14 tahun dan kurang mendapat kepuasan karena mendapat filsafat skolastik, Aristoteles, sebagaimana ia dalam Autobiografinya.<sup>4</sup>

Ketika berumur 22 tahun, dia mulai memberikan pendidikan kepada keluarga bangsawan William Cavendish. Hobbes bersama dengan William Cavendish yang membiayainya berkeliling ke negara-negara Eropa melalui Perancis dan Italy. Dia mengenal budaya dan bahasa dan untuk pertama kalinya menentang keras filsafat skolastik. Setelah dia kembali, dia mempelajari tulisan klasik dengan mendapatkan semangat baru. Dia juga banyak membaca tulisan yang berbahasa Yunani dan Latin. Akhirnya muncul dalam dirinya ketertarikan untuk mempelajari masalah-masalah politik, sebagai buktinya, dia

---

<sup>3</sup> *The Encyclopedia Americana*.

<sup>4</sup> *The New Encyclopedia Britannica* (New York : 1986) 4.

menterjemahkan buku Thucydides,<sup>5</sup> yang mana dia menyerahkan kepada temannya, Ben Jonson, untuk mengkritik dari gayanya, dipublikasikan "untuk memunculkan teman-teman setanah airnya kelemahan dari demokrasi" Itu muncul pertama pada tahun 1628-1629, dengan singkat setelah surat permohonan hak.<sup>6</sup>

Hobbes mengadakan suatu perjalanan ke Benua dengan muridnya tahun 1610. Dia mencatat bahwa yang mana sistem *Aristotelianisme* jatuh tetapi secara relatif karena adanya pengaruh teori Kepler dan Galileo. Hobbes kembali ke London yang mana dia membuat beberapa pendapat seperti Francis Bacon, Ben Jonson, Edward Hebert (Kemudian Baron Hebert dari Cherbury), dan Sir Robert Aston dan dipublikasikan (1628-1629) Sebuah translasi tentang kebebasan mengeluarkan pendapat (suara). Yang kemudian dijelaskan pada motifasinya dalam mempublikasikan translasinya dan hasilnya menjadikan perubahan besar pada perjalanan demokrasi pada pertumbuhan politik pada saat itu.<sup>7</sup>

Di Eaerl Devonshire meninggal di tahun 1626 dan muridnya meninggal dua tahun kemudian. Seperti kehidupan ekonomi Hobbes secara langsung, meninggalkan keluarganya dari tahun 1636 dia mengajar anak dari bangsawan Geevase Clifton, mereka mengadakan perjalanan menuju Perancis dan mungkin

<sup>5</sup> *Encyclopedia Britannica*, 42.

<sup>6</sup> Thomas Hobbes, *Leviathan* Edited by Nelle Fuller da Great Books of The Western World (Chicago, Dent, 1986) 41.

<sup>7</sup> *The Encyclopedia Americana*.

sampai ke Spanyol. Dan dia mengatakan bahwa pada periode pertama ini dia membuat sebuah pernyataan bahwa sekali lagi dia jatuh cinta pada pelajaran Geometri.<sup>8</sup>

Setelah patron (majikannya) meninggal dunia, dia mengajar keluarga sir Gervase Clifton. Berkat pekerjaan ini, dia dapat mengadakan perjalanan yang kedua kalinya ke Paris. Di sanalah dia mulai tertarik mempelajari matematika dan geometri. Akhirnya keluarga Cavendish memanggil kembali Hobbes untuk mengajar Earl of Devonshire.<sup>9</sup> Dalam beberapa tahun berikutnya, dia mentraining muridnya dengan materi ilmu klasik, retorika, logika, astronomi, dan prinsip-prinsip hukum. Pada tahun 1634 bersama dengan muridnya dia mengadakan perjalanan ke Italia, selama dia berada di Italia, mendalami filsafat alam dan **meneliti rahasia benda dan rahasia gerak**<sup>10</sup>

Di Itali dia mengunjungi Galileo yang menurut rumor, menasehatinya, bahwa etika boleh diberlakukan dalam metode geometri. Etika geometri dari waktu perjalanan ini, Hobbes diklaim bahwa dia mulai diingat diantara para filosof dan kembali pada 1637, mempersiapkan untuk menerangkan sistem filsafatnya di bagian karangan, pada tubuh, manusia dan sosial.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> H. S. Gordon, *A History of Philosophy* (New York: Routledge, 1991) 71, *Encyclopedia Americana*, 72

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Thomas Hobbes, *Leviathan*, 41.

Tahun 1640 ketika pertemuan singkat dari parlemen, dia membuat suatu pengertian bahwa untuk menghasilkan suatu skema tentang politik yang handal, didukung oleh kekuasaan raja secara mutlak. Hasil dari pendapat itu ditulis dalam sebuah buku dengan judul elemen sebuah hukum, *Natural politik* yang disirkulasi, disalin dan dipublikasikan sepuluh tahun kemudian (1650) dimodifikasi dalam dua bentuk essay, *of Human Nature and De Corpore Politico*. Ketika parlemen baru terbentuk dengan pertanggungjawaban dari Sir Thomas Wentworth, 1<sup>st</sup> Earl dari Straford, Hobbes mengalami ketakutan dengan keamanannya karena pandangan dirinya terekspresikan, sesudah kepergiannya menuju Paris, untuk memulai kembali produktifnya sebuah periode seperti seorang filosof politik.<sup>12</sup>

Pengasingan Prancis. Di Paris Hobbes disambut oleh Merseme yang mana dia mengkontribusikan *Meditasi Descartes Critism* dan kemudian dipublikasikan. Dia secepatnya kembali pada posisinya di Latin dengan doktrin yang diangkat oleh dirinya sendiri dan pada tahun 1642 membawa atau mengeluarkan *De cive* adalah sebuah permainan sebuah teori politik. Sementara itu perang peradaban terjadi di Inggris. Hobbes dan para pengikutnya mengeluarkan sebuah tulisan yang terkenal yang di beri judul *Leviathan* yang ditulis dalam bahasa Inggris dan dipublikasikan

---

<sup>12</sup> *The Enciclopedia Americana*, 258.

akhir tahun 1651 di London.<sup>13</sup>

Hobbes selama empat tahun bekerja pada opties dan di Corpore. Tahun 1646 pangeran Inggris yang sekarang adalah Charles II, mencari perlindungan menuju Paris, dan Hobbes diterima untuk mengajar dia dalam matematika, berhubungan dengan pembuangannya di Inggris dia mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi tentang filsafat alam, dan dia kembali lagi pada teori politik tahun 1647 mempublikasikan argumennya yang ke dua dari devisi dan tahun 1651, dalam versi Inggris tahun 1650 naskah tentang elemen hukum di publikasikan menjadi dua bagian seperti *Human Nature* dan *de Corpore Politico* ( di dalam tubuh politik itu sendiri ).<sup>14</sup> Tahun 1666 dia diangkat sebagai tutor yaitu tutor geometri, yang membahas tentang lingkaran, kubus dan lain sebagainya.

Di akhir tahun 1682 buku-buku Hobbes di bakar di Oxford pada tahun

1672 dia membuat sebuah authobiografi yang singkat dalam versi bahasa Latin dan di beberapa tahun kemudian dia menutup kariernya sebagai seorang literatur . Tahun 1675 akhirnya Hobbes meninggalkan London menghabiskan sisa hidupnya di Chastworth dan Hardwick adalah salah satu keluarga Cavendish, dia meninggal di Harwick pada 4 Desember 1679 di usianya yang ke 91, dia disemayamkan dekat Gereja di Paris dari Hault Hucknall. Seorang teman Hobbes, John Aubrey menilai

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *The New Encyclopedia Britannica*, Vol. 5 (Chicago:1768) 960.

Hobbes dengan melihat foto Hobbes , bahwa Hobbes adalah termasuk seorang yang bertingkah laku aneh. Semasa hidupnya dan saat masih muda dia pernah berkata bahwa dia ingin menjadi orang yang tinggi dan tampan. Kira-kira di usianya yang ke-40 tahun dia masih kelihatan sehat, bersemangat dalam melakukan seluruh kegiatannya sehari-hari, meminum minuman keras kira-kira hanya sekali dalam setahun.<sup>15</sup>

Dan dia tidak pernah menikah, tetapi dia pernah berkata bahwa dia mempunyai seorang adik perempuan. Di dalam hidupnya, kebijaksannya, kejujurannya, persahabatannya, dan semua tingkah lakunya selalu dia lakukan dan dia kerjakan dengan apa adanya, di usianya yang ke 45 dia masih bisa bermain tenis sehingga dapat disimpulkan bahwa Hobbes mempunyai daya tahan tubuh yang tinggi.<sup>16</sup>

## **B. Pemikiran dan Latar Belakang Pemikirannya**

### **a. Pemikiran Filsafatnya**

Sebagaimana telah diketahui bahwa Hobbes hidup dalam zaman yang penuh dengan keganasan dan kekejaman, di dalam sejarah Inggris, Hobbes muncul setelah renaissance, dimana perhatian dalam pemikirannya tidak lagi pada hal-hal yang abstrak dan kepada pengertian-pengertian. Perhatian pada

---

<sup>15</sup> *The Encyclopedia Americana*, 258-259.

<sup>16</sup> *Ibid*.

abad ini sudah mengacu pada alam semesta dan kepada manusia, kepada kehidupan kemasyarakatan dan kepada sejarah.

Pada abad inilah Ilmu pengetahuan mulai berkembang dan bebas untuk berfikir, karena pada abad renaissance dikungkung oleh pihak gereja sehingga ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan tidak berkembang. Segala realitas yang ada dijadikan sasaran penyelidikan. Para pemikir renaissance berpendapat bahwa wahyu memiliki wibawa di bidangnya sendiri. Kebanyakan orang cenderung untuk menganggap, bahwa akal tidak berwibawa atas kebenaran-kebenaran keagamaan, akan tetapi para filosof dan pemikir berpendapat bahwa dalam hal kebenaran tidak ada ikatan wibawa. Kebenaran harus dicapai dengan kekuatan sendiri. Orang ingin menentukan sendiri apa yang harus diselidiki.<sup>17</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Suatu perkembangan yang maha penting pada waktu ini adalah timbulnya ilmu pengetahuan alam yang modern berdasarkan metode eksperimental dan matematis.<sup>18</sup> Pada abad 17 pemikiran renaissance mencapai penyempurnaannya pada diri beberapa tokoh besar. Oleh karena itu pada masa ini yang di pandang sebagai sumber pengetahuan hanya apa yang secara alamiah dapat dipakai manusia yaitu akal ( rasio ) dan pengalaman ( empiri ),

---

<sup>17</sup> Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2* (Yogyakarta : Kanisius, 1980) 13.

<sup>18</sup> K. Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat* (Yogyakarta : Kanisius, 1980) 44.

padahal orang cenderung untuk memberi tekanan kepada salah satu dari keduanya itu, maka pada abad ini timbul dua aliran yang saling bertentangan yaitu aliran rasionalisme dan aliran empirisme.<sup>19</sup>

Di mana rasionalisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang mencukupi dan yang dapat dipercaya adalah rasio sedangkan empirisme, pengalamanlah yang menjadi sumber pengetahuan, baik pengalaman batiniah maupun lahiriah.

Thomas Hobbes merupakan penganut aliran empirisme di Inggris sebagai orang pertama dia menentang filsafat dan sains Aristotelian<sup>20</sup> dengan sepakat dengan Bacon mengenai pandangan bahwa ilmu pengetahuan seharusnya menganugerahkan kekuatan pada manusia dan memperbaiki keadaan materialnya. Di pengaruh oleh Galileo (1564-1643), Hobbes mencoba menerapkan filsafat alamnya pada manusia maupun masyarakat dan secara esensial dia harus di anggap sebagai filosof dalam masalah- masalah dunia, masyarakat dan manusia dibandingkan dalam bidang metafisika murni atau epistemologi.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat* ..., 18.

<sup>20</sup> Sebagai contoh filsafat Aristoteles yang ditentang Hobbes adalah bahwa menurut Aristoteles manusia adalah binatang sosial yang secara kodrati membentuk masyarakat, sedangkan Hobbes mengatakan, bahwa manusia adalah mesin anti sosial yang membentuk masyarakat secara mekanistik bukan kehendak alamiah.

<sup>21</sup> Sayyed Husein Nasr, *Menjelajah Dunia Modern* (Bandung : Mizan, 1995) 164.

Hobbes, filsuf aliran nominalistik<sup>22</sup>- empiristik. Berfikir ialah hitung menghitung dengan istilah- istilah<sup>23</sup> Hobbes telah menyusun suatu sistem yang lengkap. Nominalistik menampilkan pandangan minimal yang berkenaan dengan problem universal bukanlah entitas real, entah dalam dunia entah dalam pikiran, tetapi hanya nama-nama yang menunjuk kelompok atau kelas hal-hal individual. Hobbes termasuk dalam nominalisme abad pertengahan yang menegaskan bahwa yang sungguh-sungguh ada hanyalah benda-benda individual dengan ciri-ciri individualnya. Konsep-konsep umum yang diciptakan pikiran kita, sama sekali tidak berada secara independen dari benda-benda. Nominalisme berkaitan erat dengan kecondongan-kecondongan materialis. Kecondongan ini mengakui bahwa yang primer adalah benda-benda dan konsep adalah skunder.

Sebagai contoh bahwa jika kita memberi nama benda kursi itu tidak sama ketika benda itu masih dalam idea atau pikiran. Ketika memberi nama biru, warna biru itu tidak dapat independen sebelum berada pada benda lain. Yang real ada dalam pikiran sedangkan yang nampak hanyalah fiktif.

<sup>22</sup> Nominalistik di sini adalah aliran filsafat yang mengajarkan, bahwa konsep-konsep umum tidak berdasarkan sesuatu yang umum pula dalam kenyataan. Lihat Dick Hartono, *Kamus Populer Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) 70, dan Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996) 724-725.

<sup>23</sup> Dick Hartoko, *Kamus Populer Filsafat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995) 39.

<sup>24</sup> Lorens bagus, *Kamus Filsafat*, 724.

Ia berpangkal kepada empirisme secara konsekuen, namun ia juga menerima metode yang dipakai dalam ilmu alam yang bersifat matematis. Sasaran filsafat adalah fakta-fakta yang diamati, sedang maksudnya adalah mencari sebab-sebabnya. Adapun peralatannya adalah pengertian-pengertian yang diungkapkan dalam kata-kata yang menggambarkan fakta-fakta itu.<sup>25</sup> Yang terpenting dalam filsafat Hobbes adalah mewujudkan suatu sistem yang lengkap mengenai tentang “yang ada” secara mekanis, yang nantinya akan sangat bersinggungan dengan teorinya tentang masyarakat (*civil society*). Hobbes yang oleh orang-orang sesamanya di salah pahami sebagai seorang yang atheis, mengambil istilah hukum kodrat tapi mempergunakannya untuk mengartikan perintah-perintah kepentingan diri yang cerdas<sup>26</sup>

#### 1. Manusia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan pandangannya yang demikian itu manusia tidaklah lebih dari pada suatu bagian alam bendawi yang mengelilinginya. Oleh karena itu, maka segala sesuatu yang terjadi padanya dapat diterangkan dengan cara yang sama dengan cara menerangkan kejadian-kejadian alamiah, yaitu secara mekanis manusia hidup secara darahnya beredar dan jantungnya bekerja, yang disebabkan karena pengaruh mekanis dari hawa atmosfer.

---

<sup>25</sup> Harun Hadiwijono, 32.

<sup>26</sup> Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial*, (Yogyakarta : Kanisius, 1994) 86.

Hidup manusia adalah gerak anggota-anggota tubuhnya<sup>27</sup>

Sebagai seorang materialis dan mekanis, Hobbes bebas berpegang pada tingkah laku manusia di mana ditentukan oleh efek dari kehidupan yang stimulusnya dioperasikan oleh karakter alamiah oleh kualitas yang sederhana, terutama pada dorongan dari dalam individu itu sendiri, tercipta dari dalam dirinya sendiri di bagian dalam dua sifat kemanusiaan yang terpenting ada rasa takut ada kesakitan dan keinginan untuk mempunyai kekuatan<sup>28</sup>

## 2. *Tentang Jiwa.*

Jiwa adalah kompleks dari proses-proses mekanis di dalam tubuh. Akal bukanlah pembawaan, melainkan perkembangan karena kerajinan. Ikhtiar adalah suatu awal gerak yang kecil, yang jikalau diarahkan menuju kepada sesuatu disebut keinginan, yang sama dengan kasih, dan yang jikalau diarahkan untuk meninggalkan sesuatu disebut keengganan atau keseganan, yang sama dengan kebencian. Kehendak bukanlah sesuatu yang berbeda dengan keinginan dan keengganan, tetapi hal yang sama dengan itu, namun yang terkuat, yaitu jikalau terjadi bentrokan-bentrokan. Dengan

---

<sup>27</sup> Harun Hadiwijono, 33.

<sup>28</sup> Edwin R.A. Seligman, *Encyclopedia of The Social Science Vol. III-VIII* (New York : The Macmillan Company MCM) 395.

ini Hobbes tidak mengakui kehendak bebas.<sup>29</sup>

### 3. Pengenalan

Pengenalan diperoleh karena pengalaman, pengalaman adalah awal dari segala pengetahuan, juga awal pengetahuan tentang asas-asas yang diperoleh dan diteguhkan oleh pengalaman. Semua ilmu pengetahuan dihasilkan dari pengalaman. Hanya pengalamanlah yang memberi jaminan kepastian.

Pengenalan dengan akal hanya mempunyai fungsi mekanis semata-mata, sebab pengenalan dengan akal mewujudkan suatu proses penjumlahan dan pengurangan. Pengenalan dengan akal mulai dengan memakai kata-kata (pengertian-pengertian), yang hanya mewujudkan tanda-tanda yang menurut adat saja, dan yang menjadikan roh manusia dapat memiliki gambaran dari hal-hal yang diucapkan dengan kata-kata itu. Pengertian-pengertian umum hanyalah nama saja, yaitu nama-nama bagi gambaran-gambaran ingatan tersebut, bukan nama-nama bendanya. Nama-nama benda itu tidak mempunyai nilai-nilai obyektif. Pendapat atau pertimbangan adalah penggabungan dua drama, sedang silogisme adalah suatu soal hitung, di mana orang bekerja dengan tiga nama.

Yang disebut pengalaman adalah keseluruhan tatalitas segala

<sup>29</sup> Harun Hadiwijono, 33.

pengamatan, yang disimpan di dalam ingatan dan digabungkan dengan suatu pengharapan akan masa depan, sesuai dengan apa yang telah diamati pada masa lampau. Pengamatan indrawi terjadi karena gerak benda-benda di luar kita menyebabkan adanya suatu gerak di dalam indera kita. Gerak ini diteruskan kepada otak dan dari otak diteruskan ke jantung. Di dalam jantung timbullah suatu reaksi, suatu gerak dalam jurusan yang sebaliknya. Pengamatan yang sebenarnya terjadi pada awal gerak reaksi tadi.

Sasaran yang di amati adalah sifat- sifat indrawi, pengendaraan di sebabkan karena tekanan obyek atau sasaran. Kualitas di dalam obyek-obyek yang sesuai dengan penginderaan kita, bergerak menekan indera kita. Warna yang kita lihat, suara yang kita dengar, bukan berada di dalam obyek, melainkan di dalam subyeknya. Sifat- sifat indrawi tidak memberi gambaran tentang sebab yang menimbulkan penginderaan. Ingatan rasa senang dan tidak senang dan segala gejala jiwani, bersandar semata-mata pada asosiasi gambaran-gambaran yang murni bersifat mekanis.<sup>30</sup>

#### 4. Etika

Hobbes adalah seorang yang menganut paham hedonisme-egoisme. Yang berpendapat bahwa mengerjakan sesuatu itu, tidak hanya karena dorongan orang untuk melakukannya sesuatu perbuatan guna

---

<sup>30</sup> *Ibid*, 34.

mencapai suatu kesenangan dirinya.<sup>31</sup> Hobbes dan pengikutnya mengembalikan dengan segala kebaikan dan manusia kepada kecintaan dan kelezatan untuk dirinya, dengan katanya: hendaknya kita memberi hukum baik kepada perbuatan kecuai menurut adanya kelezatan bagi orang yang melakukan dan tidak memberi hukum buruk kecuai kepedihannya.<sup>32</sup>

Hobbes sama dengan pendapatnya JJ. Rousseau, mengatakan bahwa moralitas bersumber pada negara atau masyarakat. Mereka berkata bahwa, sebelum manusia mengorganisasi dirinya ke dalam masyarakat politik tidak ada hal yang baik dan buruk. Negara sendiri bukanlah masyarakat kodrat, melainkan hasil dari *social contract*, persetujuan yang sama seakan konvensional, yang dengan itu manusia mengatakan sebagian hak-hak kodratnya untuk menyelamatkan hak-hak kodrat lainnya. Pada saat masyarakat sipil terbentuk, masyarakat ini memerintahkan dan melarang perbuatan-perbuatan tertentu guna tercapainya *common good*. Dan inilah saat munculnya hal yang baik dan hal yang buruk. Jadi, tidak ada perbuatan yang baik dan yang buruk menurut hakekatnya tetapi hanya karena di perintahkan atau di larang oleh negara, jadi teori tersebut menyamakan

---

<sup>31</sup> H. Artani Hasbi, *Diktat Kuliah Filsafat Akhlak* (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 1999) 39.

<sup>32</sup> Ahman Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)* Terj. Farid Ma'ruf (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), 95.

moralitas dengan *civil legality*.<sup>33</sup>

Di sini yang menjadi perhatian kita adalah kenyataan bahwa mereka menolak adanya moralitas intrinsik dan jelas mereka menegaskan bahwa sahnya moralitas hanya sejak negara itu telah terbentuk.

##### 5. Politik

Ia mengingkari bahwa manusia menurut kodratnya adalah makhluk sosial. satu-satunya kecondongan kodrat manusia ialah mempertahankan adanya. Itu mengakibatkan suatu egoisme radikal: "*homo homini lupus*" (manusia adalah serigala manusia) tetapi justru dalam keadaan demikian manusia justru tidak mampu untuk mempertahankan adanya. Itulah sebabnya manusia mengadakan perjanjian, yaitu bahwa mereka akan takluk pada suatu kekuasaan dengan demikian negara timbul. Menurut

Hobbes, masyarakat bukanlah muncul berdasar kodrat, tetapi hanyalah ciptaan manusia sendiri yang saling mengadakan kontrak sosial untuk membentuk masyarakat tertentu, maka sifat-sifat dan tindakan-tindakan individu-individu yang membentuk masyarakat.<sup>35</sup>

Menurut Hobbes, negara mempunyai kuasa yang tanpa batas, juga

<sup>33</sup> W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral* (Bandung : Pustaka Grafika, 1999) 124.

<sup>34</sup> K. Bertens, *Ringkasan Sejarah ...*, 51.

<sup>35</sup> P. Hardono Hadi, *Jati Diri Manusia (Berdasar Filsafat Organisme White Head)* (Yogyakarta : Kanisius, 1996) 114.

dari dalam gereja. Rakyat diharuskan berbakti kepada Allah, untuk memenuhi tugas itu telah dianggap cukup kalau orang percaya, bahwa Allah ada, dan bahwa ia telah mengutus Kristus untuk memasyurkan kerajaan yang akan datang.

#### 6. *Metode Pendekatan*

Tentang dunia dan manusia ia menganut suatu pendapat materialistis, sehingga ajaran Hobbes merupakan sistem materialistis yang pertama dalam sejarah modern. Menurut Hobbes seluruh dunia, termasuk juga manusia merupakan suatu proses yang berlangsung dengan tiada henti-hentinya atas dasar hukum-hukum mekanisme saja. Jadi, dapat dipahami bahwa manusia adalah sebuah alat mekanisme yang harus didamaikan dengan metode mekanisme geometris dan dengan pendekatan psikologis yang menentang metode induktif, Hobbes mencari kepastian mutlak sebagai satu-satunya tujuan yang secara intelektual memuaskan satu-satunya dasar untuk menetapkan bentuk masyarakat, yang stabil.

Hobbes berfikir bahwa dia telah menemukan jalan menuju kepastian dalam metode geometri. Dia terpesona oleh cara Euklide, atas dasar segelintir kebenaran mengenai garis, titik dan sudut, dapat membuktikan melampaui segala kesangsian sejumlah kesimpulan yang tidak jelas mengenai segitiga, empat persegi panjang, dan lingkaran yang tampak dapat diterapkan langsung ke dunia yang dapat diamati. Ini dapat dicapai

dengan metode deduksi (yaitu pembuktian bahwa dengan adanya aksioma-aksioma, mustahillah menyangkal kesimpulan-kesimpulan tertentu tanpa berkontradiksi dengan dirinya sendiri.<sup>36</sup>

### C. Latar Belakang Pemikiran Sosial Kemasyarakatan

Latar belakang filsafat negara Hobbes adalah situasi dalam negeri Inggris dalam abad ke-16 dan 17. Situasi itu ditandai oleh perpecahan, pemberontakan, dan perang-perang saudara. Abad 17 adalah zaman perang agama dan persaingan antara partai kaya dan partai parlemen. Hobbes bertanya, bagaimana filsafat politik dapat dibangun sebagai ilmu pengetahuan yang tidak sejak semula sudah dikacaukan oleh keinginan-keinginan, nilai-nilai harapan-harapan, dan tujuan-tujuan subyektif; pendek kata oleh nafsu-nafsu manusia.<sup>37</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam perjalanan hidupnya Hobbes mengalami banyak kejadian yaitu situasi yang keras dan kejam, masyarakat di hantui oleh kecemasan, ketakutan, dan ancaman. Perang saudara terjadi pada saat itu. Diapun dilahirkan di lingkungan yang keras dalam keluarga yang pada saat itu ayahnya sering naik darah. Sehingga dalam berfikirpun ada kemungkinan sesuai dengan pendidikan ketika di dalam rahim dan mempengaruhi cara berfikir yang keras dan tegas.

Di tambah dengan fenomena yang ada di negerinya yang kacau, riwayat

---

<sup>36</sup> Tom Campbell, 87

<sup>37</sup> Fran Magnis - Suseno, *Kuasa dan Moral* (Jakarta : Gramedia, 1995) 10.

hidup yang diceritakan cukup dramatis, sangat membantu untuk memahami arah filsafatnya, ketika melihat fenomena yang terjadi seakan-seakan Hobbes diobsesi oleh pertanyaan: bagaimana masyarakat dapat ditata sedemikian rupa sehingga kekacauan sebagaimana dialaminya sendiri dapat terelak? Atau: apa hubungannya antara negara dan hukum, kekuasaan dan moralitas sehingga masyarakat dapat hidup berdamai?<sup>38</sup>

Adalah hal yang biasa bahwa Hobbes melihat dua sebab utama perselisihan sipil di Inggris. Yang pertama adalah ketiadaan kesepakatan terhadap supremasi hukum raja, yang lain adalah keinginan orang untuk menempatkan intuisi keagamaan mereka sebagai pedoman bagi diri mereka sendiri dan bagi orang lain suatu konsekuensinya pembantahan esktrim yang harus dirasakan jika mereka mengira bahwa keselamatan abadi mereka tergantung pada perselisihan politik. Ketidaksepakatan ini membuka jalan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menggugat suatu kekuasaan yang melampaui batas antara lain para hakim, anggota parlemen, Anggota gereja presbyterian dan Katolik. Patut diperhatikan bahwa intelektualisme esktrim sehingga menganjurkan bahwa perang saudara timbul semata-mata dari kekeliruan intelektual mengenai sifat kekuasaan. Manusia akan mempercayai apapun yang memperkuat kekuasaan mereka, sehingga walaupun benar kekuasaan beberapa orang bersumber dari

---

<sup>38</sup> Fran Magnis - Suseno, *Etika Politik*, 202

penerimaan kekeliruan ini bersandar pada usaha mencari kekuasaan. Hobbes sangat terpengaruh pada pandangan bahwa perdamaian dapat dipertahankan untuk jangka tidak tertentu jika doktrin yang baik di sebar luaskan -jika Levithan dijadikan buku wajib unervisitas-unervisitas: namun dengan cepat ia mengatakan bahwa kekeliruan tidak dapat dihapus hanya dengan dibicarakan saja.<sup>39</sup>

Kenyataan yang diamati Hobbes nampaknya kontradiktoris. Dari satu segi, semua pihak, apa raja atau parlemen, begitu pula dengan semua kelompok agama, mendasarkan perjuangan mereka pada prinsip-prinsip religius dan moral yang paling luhur dari lain segi, mereka muncul dengan kejam dan bengis keirian hati dan balas dendam merajalela, dari pengamatan itu Hobbes menarik dua kesimpulan pertama menata masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip normatif, seperti misalnya tuntutan agama dan moral adalah mustahil.<sup>40</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Seperti dalam kenyataan sosial sekarang ini, jika hanya diberikan prinsip-prinsip agama/akhlak adalah hanya omong kosong,, karena manusia hanya akan membuat agama sebagai kedok atau pun alat untuk mencapai kepentingan sendiri-sendiri. Dan akhirnya berbentuk golongan atau parpol yang beratas namakan agama untuk maksud kekuasaa. Dan yang lemah akan kalah dan dan yang menang akan menjadi penguasa. Pada akhirnya yang kalahpun tidak akan

---

<sup>39</sup> David Miller dan Larry Sicdentop, *Politik dalam Perspektif Pemikiran Filsafat*, Terj. Nazaruddin Syamsuddin (Jakarta : Rajawali, 1986) 326.

<sup>40</sup> Frans Magnis - Suseno, *Etika Politik*.

tinggal diam untuk balas dendam. Itulah fenomena yang terjadi sekarang tidak jauh dengan yang dihadapi Hobbes.

Kedua yaitu masyarakat hanya dapat ditata dalam perdamaian, apabila pengaruh emosi dan nafsu dapat dielakan. Maka pertanyaan pokok filsafat politik menurut Thomas Hobbes berbunyi : bagaimana masyarakat dapat ditata bebas dari pengaruh emosi dan napsu-nafsu.<sup>41</sup>

Dengan mendasarkan diri pada metode-metode ilmu pasti pengukuran dan pembuktian empiris melalui eksperimen dan membebaskan diri dari metafisika, bahwa kepentingan dan emosi manusia tidak terlibat.

Pada zaman nabi , yaitu pada awal kenabiannya pun banyak terjadi pemusuhan, di mana pada waktu itu, nabi menyiarkan agama yang di bawahnya cara terang-terangan yang berakibat makin meningkatnya tindakan permusuhan dan penganiayaan oleh orang-orang kafir mekkah terhadap orang-orang Islam. Dan perang antar suku pun terjadi. Dalam keadaan seperti itu umat atau suku ingin damai dan tidak tahan dengan derita yang di alami.

Untuk mendamaikan mereka sendiri, penduduk Yathrib menemui Nabi di Aqabah; mereka selain mengakui kerosulan nabi atau masuk islam juga berbai'at atau berjanji , dikenal dengan "*Bai'at Aqabah Pertama*."<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta : UI-Press, 1993) 9.

Dan dengan adanya “ Perjanjian Madinah” atau “Piagam Madinah” ini menandakan bahwa secara formal harus ditata dengan metode yang sesuai dengan kondisi manusia saat itu. Yang maksudnya agar masyarakat, dengan adanya negara dan peraturan yang ada terwujud civil society yaitu rukun dan damai dan berakhlak mulia serta menjalankan perintah agama.

Hobbes pun bercita-cita untuk mengembangkan suatu filsafat atau teori negara yang dapat membantu untuk menyusun masyarakat. Dalam keadaan damai dan adil. Atas dasar anthropologis Hobbes kemudian membangun filsafatnya hingga negara sebagai leviathan yang harus mutlak kekuasaannya dan menakutkan, karena hanya demikian ia dapat menertibkan manusia dan menjamin suatu kehidupan bersama yang aman dengan demikian bahagia.

#### **D. Karya-karyanya**

Di samping kehidupan yang tampaknya tentram ini, yang hebat yang tidak tentram sama sekali. Inggris di masa hidupnya digelimangi oleh tanda-tanda perang saudara, malah oleh perang saudara itu sendiri, yang mengakibatkan kepala negara berganti kecemasan dan ketakutan merajalela, serta kepentingan diri menonjol ke depan keadaan ini dikonstalisasi oleh Hobbes oleh Hobbes, dan sungguhpun ia tidak ikut serta dalam perlindungan ini, dan hanya memperagakan kediriannya dalam bentuk tulisan yang mengandung buah pikiran tentang masyarakat dan negara, namun ia sendiri tidak pula mendapat penghargaan di

negerinya.<sup>43</sup>

Sebagai tokoh filsuf yang termasyhur dan mempunyai perhatian terhadap masalah-masalah politik, hobbes memiliki sejumlah karya tulis :

### 1. *Little Treatise*

Merupakan karya filosofinya pertama, ia menggunakan geometri sebagai metodologi penjelasan ilmiah untuk menerangkan keberadaan term-term gerakan materi dalam sebuah autobiografi yang ditulisnya dalam versi Latin, Hobbes menyatakan bahwa salah satu pertanyaan filosofis awalnya adalah "apakah raja itu?" Ketika merefleksikan tentang hal itu menjadi jelas baginya bahwa benda-benda senantiasa diam atau dalam gerak seragam yang relatif terhadap yang lainnya; tidak ada diskriminasi, dan pengetahuan, persepsi, edukasi menjadi mustahil. Kesimpulan umumnya adalah bahwa gerak (dalam keragaman gerak) dapat ditemukan penyebab segala sesuatu yang telah wujud dan yang telah menjadi sebagaimana adanya.<sup>44</sup>

### 2. *De cive (1642)*

Membahas metode yang benar untuk mengatur perilaku sosial serta membina nilai-nilai dan hubungan-hubungan sosial yang benar.<sup>45</sup> Buku ini

<sup>43</sup> Diliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Bandung : Mizan, 1997) 10.3.

<sup>44</sup> Tim Penulis Rosda, *Kamus Filsafat Pengantar Jalaluddin Rahmat* (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 1995) 38.

<sup>45</sup> *Ibid.*

merupakan karya pertama yang menerangkan secara mendetail teori politik. Teori politik yang dirumuskan dalam buku-buku ini dijelaskan panjang (ditafsiri) dalam bukunya Hobbes yang berjudul *Leviathan*, ditulis 1642 dan terbit dalam bahasa Latin tahun 1642.

### 3. *De Corpore*

Menjelaskan semua peristiwa fisik dan benda material dalam term-term gerakan dan materi dalam term-term gerakan dan materi dalam gerak.<sup>46</sup>

### 4. *De Homine (1658)*

Ia menunjukan bahwa gerak, perpindahan material yang berbeda dan partikular merupakan penyebab dari fenomena seperti sensasi, persepsi, emosi, pemikiran, ingatan, dan pengetahuan. Dipandang secara utuh, ketiga karya itu mengupayakan integrasi material dan mekanis yang sistematis dari materi (benda), manusia, dan warga masyarakat dan negara upaya untuk menemukan benang analisis, penjelasan, dan hubungan yang umum, fundamental, menyatu dan mekanistik

### 5. *Human Nature dan de Corpore Politico (1650)*

Merupakan naskah tentang elemen hukum.<sup>47</sup> Dua karya ini di tulis pada tahun 1640 dan diterbitkan 1650. Karya ini diterbitkan oleh F. Tonnes dengan

---

<sup>46</sup> *Ibid*, 139.

<sup>47</sup> *Ibid*.

judul *Element of Law Natural and Politic* cetakan ke 2 tahun 1928.

#### 6. *Commonwealth*

*Commonwealth* artinya adalah negeri persemakmuran bersama istilah ini dipergunakan oleh pemerintah Inggris tahun 1649-1653, yaitu masa penghapusan monarki hingga masa pembentukan protektorat ketika pemerintahan di bawah Cromwell. Dalam buku ini ditentukan tentang syarat-syarat hukum juga menetapkan kedudukan juga pengetahuan membahas masalah perbedaan pendapat, dan mendefinisikan karakter kewajiban dalam buku ini Hobbes mengikhtisarkan kekuasaan para penguasa, duniawi.

#### 7. *Leviathan*

*Leviathan* diambil dari nama hewan laut yang besar, yang disebut dalam perjanjian lama. *Leviathan* sejenis monster (hewan raksasa) yang ganas menakutkan dalam mengancam makhluk-makhluk lainnya. *Leviathan* adalah karya Hobbes yang paling terkenal dan ditulis tahun 1651 diterbitkan di London buku ini membahas masalah negara dan kekuasaan dalam buku ini diungkapkan pertama kekuasaan negara yang bersijat absolut dan membatasi kekuasaan gereja gereja terhadap masyarakat semata-mata hanya bertujuan agar rakyat tunduk dan patuh terhadap negara, demi terwujudnya perdamaian, kemudian karya ini oleh Hobbes dipersembahkan kepada Charles II.

### BAB III

## KONSEP THOMAS HOBBS TENTANG CIVIL SOCIETY

#### A. Pengertian *Civil society*

√ Term *civil society* sebenarnya belum akrab ditelinga masyarakat bahkan padanan katanya belum disepakati, ada yang menyebutnya “masyarakat sipil”, “masyarakat madani”, bahkan “masyarakat warga”.<sup>1</sup> Topik *civil society* baru merupakan wacana, yang masing-masing pendapat mempunyai makna yang berbeda-beda karena pemahaman dan pendekatan mereka yang berbeda pula.

Dalam pengistilahan *civil society* dan masyarakat madani masih terjadi pro dan kontra cukup menarik untuk dibahas sebagai landasan teorinya untuk mengintervensi

keobyektifan konsep *civil society* Thomas Hobbes.

√ Dari terminologinya *civil society* berasal dari kata *civil*, Inggris yang berarti beradab, dalam istilah latinnya *civilis*; warganegara yaitu suatu taraf peradaban masyarakat yang ditandai dengan ciri-ciri perubahan-perubahan sosial dan budaya yang konstan.<sup>2</sup> Sedangkan *society* dari istilah Inggris yang berarti masyarakat yakni suatu kelompok manusia yang hidup bersama mempunyai budaya yang berbeda-beda, menempati suatu area tertentu dalam rangka mencapai suatu kepentingan bersama yaitu aman tentaram dan damai. Jadi *civil society* suatu masyarakat warga yang berperadaban dan dinamis.

Istilah *civil society* yang juga sering disebut dengan masyarakat sipil ini secara

---

<sup>1</sup> *Forma*, Edisi XIX/ Th. X/1996:21.

<sup>2</sup> K. Prent C.M dkk. *Kamus Latin Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1969), 140.

substansial sudah ada sejak zaman Aristoteles, yakni suatu masyarakat yang dipimpin dan tunduk pada hukum. Penguasa, rakyat dan siapapun, menurut Aristoteles, harus taat pada hukum yang telah dibuat secara bersama-sama. Bagi Aristoteles, siapapun bisa memimpin negara secara bergiliran dengan syarat ia bisa memimpin dengan adil. Dan keadilan baru bisa ditegakkan apabila setiap tindakan didasarkan pada hukum. Jadi hukum merupakan ikatan moral yang bisa membimbing manusia agar senantiasa berbuat adil.<sup>3</sup>

Seorang Dawam Raharjo dengan menyitir keterangan Salmartche memperjelas apa yang dimaksud dengan *civil society*, yaitu yang menggambarkan suatu masyarakat dalam yang paling sederhana, yaitu masyarakat yang tidak merupakan bagian dari negara yang mengendalikan kekuasaan dan bersifat aneka ragam (*diversity*). Konsep ini bisa menggambarkan gejala yang terjadi di masa transisi yang telah meninggalkan *tahap feodal* menuju kepada masyarakat modern yang lebih kompleks.<sup>4</sup>

Dalam pandangan Muhammad AS Hikam, istilah *civil society* kini sering diterjemahkan dengan masyarakat kewarganegaraan atau masyarakat madani, tampaknya semakin mendapat tempat di dalam wacana politik di Indonesia sebagai sebuah konsep.<sup>5</sup>

Dalam khasanah pemikiran politik, perkembangan istilah *civil society* bisa diurut sejak Cicero (106-43 SM) yang pertama kali menggunakan *societes civilis* dalam filsafat politiknya. 1690, John Locke menulis buku *Civilian Government* yang berisi penekanan pada peran masyarakat dalam menghadapi kekuasaan mutlak para raja dan hak-hak istimewa para bangsawan. Misi John Locke adalah

<sup>3</sup> M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: Logos, 2000) V.

<sup>4</sup> Dawam Raharjo, *Masyarakat Madani Di Indonesia Sebuah Penjajakan Awal* (Jurnal Pemikiran Islam Paramadina: Vol. 1, no. 2, 99) 25.

<sup>5</sup> Muhammad AS. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996) 1.

bagaimana membangun pemikiran otoritas masyarakat untuk merealisasikan kemerdekaannya dari hegemoni elit yang memonopoli kekuasaan dan kekayaan.<sup>5</sup>

Franz Magnis Suseno dalam bukunya *Etika Politik*, bahwa istilah “masyarakat luas” merupakan terjadi dari istilah Inggris “*civil society*” (Jerman: “*buerger liche Gesellschaft*”).<sup>6</sup>

Di zaman modern istilah *civil society* dihidupkan dan dikembangkan oleh pemikir atau filsuf sosial antara lain Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) dan J.J Rousseau (1712-1778), untuk mengungkapkan pemikirannya mengenai masyarakat dan politik. Thomas Hobbes umpamanya, berpendapat bahwa perjanjian masyarakat diadakan oleh individu-individu untuk membentuk suatu masyarakat politik atau negara. Locke mendefinisikan masyarakat sipil sebagai “masyarakat politik” (*political society*). Pengertian tentang gejala tersebut dihadapkan dengan pengertian tentang gejala “otoritas paternal” (*paternal othority*) atau “keadaan alami” (*state of nature*) suatu kelompok manusia. Ciri dari *civil society*, selain terdapatnya tata kehidupan politik yang terkait pada hukum, juga adanya keadaan ekonomi yang didasarkan pada sistem uang sebagai alat tukar, terjadinya kegiatan tukar menukar atau perdagangan dalam suatu pasar

<sup>5</sup> M. Din Syamsuddin, *Etika Agama...*, IV.

<sup>6</sup> Franz Mgnis-Suseno, *Etika Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001) 18.

bebas, demikian pula terjadinya perkembangan teknologi yang dipakai untuk mensejahterakan dan memuliakan hidup sebagai ciri dari suatu masyarakat yang telah beradab Rousseau, seorang filsuf sosial Perancis abad ke-18, mengemukakan masyarakat politik adalah merupakan hasil dari suatu perjanjian kemasyarakatan (*social contract*). Di sini anggota masyarakat telah menerima suatu pola yang berhubungan dan pergaulan bersama. Masyarakat seperti ini membedakan diri dari keadaan alami suatu masyarakat.<sup>7</sup>

Namun konsep Locke dan Rousseau ini belum mengenal perbedaan antara *civil society* dan negara. Karena negara lebih khusus lagi pemerintah, adalah merupakan bagian dan salah satu bentuk masyarakat sipil. Bahkan keduanya beranggapan bahwa *civil society* itu adalah pemerintah sipil, yang membedakan diri dari masyarakat alami atau keadaan alami.<sup>8</sup>

Kemudian istilah *civil society*, setelah berabad-abad praktis dilupakan sejak dilemparkan oleh Cicero pada abad pertama sebelum masehi, ditemukan kembali pada abad ke-17 oleh Adam Ferguson.<sup>9</sup> Oleh pemikir Inggris dan berdarah Skotlandia itu *civil society* adalah sebuah tata susila (*civility*) sebagai konsekwensi dari sebuah peradaban. Tapi definisi Ferguson, *civil society* dipakai

---

<sup>7</sup> Sufiyanto, *Masyarakat Tamaddun Kritik Hermeneutis Kritik Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*, Pengantar Ahmad Jaenuri (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, LP21F, 2001) 83.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Dawam Raharjo, *Masyarakat Madani Sebuah Penajakan....*, 26.

sebagai istilah politik untuk menggambarkan sebuah pemerintahan yang membedakan diri dari despotisme orientas (*orientas despotism*). Dalam konotasi ekonomi, *civil society* adalah masyarakat yang berperadaban (*civility*), dilawankan dengan masyarakat Barbar yang tidak mengakui hak milik atau tidak berperadaban.<sup>10</sup>

Barulah pada paruh kedua abad ke-10, terminologi ini mengalami pergeseran makna, negara dan *civil society* kemudian dimengerti sebagai dua entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial (*social formation*) dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat pencerahan (*Enlightenment*) dan modernisasi tergesurnya resim-resim absolut para pemikir politik yang memelopori pembedaan ini antara lain filsuf pencerahan Scotlandia yang di motori oleh Adam Ferguson dan beberapa pemikir Eropa seperti Johann Forster, Ton Hodgkins, Emmanueal Sieyes dan Tomm Paine.<sup>11</sup>

*Civil society* pernah dipahami secara radikal oleh para pemikir politik yakni dengan menekankan aspek kemandirian dan perbesaan posisinya sedemikian rupa sehingga menjadi antitesis dari *state*. Pemahaman seperti ini mengundang reaksi para pemikir seperti Hegel yang segera mengajukan tesis

---

<sup>10</sup> Dawam Raharjo *Masyarakat Madani di Indonesia...*, 26.

<sup>11</sup> Muhammad AS. Hikam, *Demokrasi dan...*, 2.

bahwa *civil society* tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol. *civil society* justru memerlukan sebagai macam aturan dan pembatasan-pembatasan serta penyatuan dengan negara lewat kontrol hukum lewat administratif dan politik. Pandangan Hegel tentang *civil society*, yang ia samakan dengan *Buergetliche Gesellschaft*, belakangan mendapat dukungan kuat, termasuk dari Karl Marx.

Namun konsepsi Hegelian dan Marxian tentang *civil society* yang tercatat sosiologi itu menimbulkan persoalan, karena ia mengabaikan dimensi kemandirian yang menjadi intinya. Ini disebabkan, terutama pada Hegel, posisi negara dianggap sebagai ukuran terakhir dan pemilik ide universal hanya pada dataran negaralah politik bisa berlangsung secara murni dan utuh, sehingga posisi dominan negara menjadi bermakna positif, jika *civil society* kehilangan dimensi politiknya dan akan terus tergantung kepada manipulasi dan intervensi negara.<sup>12</sup>

Untuk menetralisasi kecenderungan dua ekstrem itu, pada pemikir politik modern seperti *Alexis de Tocqueville* mencoba mengembalikan makna *civil society* pada prinsipnya yang semula, yakni tepat menepatkan kemandirian dan pluralitas sebagai asasnya yang utama, namun tanpa mengabaikan peran negara. Dengan mengambil contoh berjalannya demokrasi di *Amerika de Tocqueville* yakin bahwa warga negara akan mampu mengimbangi kekuatan negara sepanjang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

merdeka memiliki kemandirian, berpegang teguh pada pluralisme, dan memiliki kompetensi politik yang cukup.<sup>13</sup>

Sebagai formulasi Nurcholish Madjid, *civil society* dipahami sebagai masyarakat madani, ini merupakan konteks keislaman yang dibangun menurut tauladan Nabi, pengisian *civil society* justru diperoleh dari dunia kejayaan Islam klasik. Fenomena ketertarikan tokoh modernis ini terhadap *civil society* merupakan fenomena yang “terlambat” dibandingkan misalnya, perkenalannya dengan konsep-konsep Barat yang sebenarnya terkait erat dengan fenomena kebangkitan *civil society*, seperti modernitas, sekularisasi, pluralisme dan demokrasi sebelum 1966, ia membaca persoalan-persoalan keislaman dan keindonesian dengan pendekatan-pendekatan modernitas “pluralitas”, “inklusivisme”, “egalitarianism” atau melalui pendekatan Robert N. Bellah, Ernest Gellner, atau Marshall G. Hodgson “keterlambatan” ini perlu kita garis bawahi, mengingat materi-materi yang dibacanya sebagai “fenomena modern” tetap sama dengan materi-materi yang dibacanya dengan pendekatan “*civil society*”<sup>14</sup> dalam bukunya Islam, doktrin, dan peradapan (1992):

“...sebagai masyarakat egaliter partisipatif, masa klasik Islam itu menyerupai benar gambaran sebuah masyarakat. Yang adil, terbuka dan demokrasi seperti dalam konsep-konsep sosial politik modern, sifatnya yang egaliter dan partisipatif itu telah nampak dalam berbagai keteladanan Nabi sendiri, demikian pula dalam keteladanan para khalifah yang bijaksana (Al- khulafa’

<sup>13</sup> M. Din Syamsuddin, *Etika Agama...*, III.

<sup>14</sup> Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, Pengantar Muhammad AS. Hikam dan Nurcholish Madjid (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999) 220.

Al-rhasidin).<sup>15</sup>

“... atas pertimbangan ajaran itulah Nabi saw. dalam rangka menegakan masyarakat, madani atau *civil society*, tidak pernah membedakan antara “orang atas”, “orang bawah”, ataupun keluarga sendiri.<sup>16</sup>

“... Perkataan “*madinah*”, dalam peristilahan modern menunjuk kepada semangat dan pengertian ‘*civil society*’, suatu istilah Inggris yang berarti ‘masyarakat sopan, beradab, dan teratur’ dalam bentuk negara yang baik. Dalam arti inilah harus dipahami kata-kata hikmah dalam bahasa Arab, al-insan-u madaniy-un bi al-thabi’ “manusia menurut naturnya adalah bermasyarakat budaya...”<sup>17</sup>

Kiprah *civil society* yang bebas tak terkekang bukanlah suatu gagasan yang harus disambut hangat, malainkan pikiran yang sungguh mengerikan, maka dalam kontek ini seseorang terbatas oleh kebebasan orang lain, bentuk-bentuk pembatasan dijatuhkan terhadap “kiprah *civil society* yang bebas tak terkekang

jika dilihat pada paragrah di bawah ini :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“*Civil society* adalah lebih dekat dari pada sekedar campuran berbagai bentuk asosiasi. Pengertian *civil society* juga mengacu kepada kualitas *civility*, yang tanpa itu lingkungan hidup sosial akan hanya terdiri dari fraksi-fraksi, klik-klik, dan serikat-serikat rahasia yang saling menyerang. *Civility* mengandung makna toleransi, kesedian pribadi-pribadi untuk menerima berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial: juga kesediaan untuk menerima pandangan yang sangat penting bahwa selalu tidak ada jawaban yang benar atas suatu masalah. Dan penting sekali diperhatikan tidak ada berbagai serikat itu sama lain. Ironisnya, kelompok-kelompok yang memperjuangkan demokrasi dan nilai-nilai terpuji lainnya kerap kali tidak mencerminkan nilai-nilai itu dalam diri kalangan mereka sendiri ataupun pribadi para tokohnya. Malangnya *civility* adalah suatu mutu yang banyak hilang di negara-negara berkembang mungkin suatu negara

<sup>15</sup> *Ibid.*, 221.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 223.

<sup>17</sup> *Ibid.*

menjunjung tinggi kehidupan keserikatan (*associational life*) yang aktif, tapi cukup sering di negara itu *civil society* dirong-rong oleh kurangnya toleransi politik dan terkekang oleh peraturan pemerintah yang sewenang-wenang. Tidak adanya *civility* menimbulkan sikap ragu tentang prospek jangka pendek demokrasi dalam suatu negara. Tetapi jika seni berasosiasi dapat di mengerti dengan baik, maka demikian pula peningkatan dasar-dasar demokrasi. Ia sendiri menjadi melieu bagi kehidupan sosial yang sehat."<sup>18</sup>

*Civil society* dipahami oleh tokoh modernis sebagai "suatu kualitas" atau nilai-nilai seperti yang dipahaminya dari konsep *civility*. Dan *civility* pun dipahami sebagai toleransi, kesedian pribadi-pribadi untuk menerima berbagai berbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial, "atau sebagai kesedian pribadi-pribadi untuk menerima pandangan yang sangat penting bahwa tidak selalu ada jawaban yang benar atas suatu masalah. Pengertian ini sebenarnya tidak berbeda dari makna " musyawarah yang pernah dipahami sebagai

"(hak) sikap orang untuk memilih dan menyatakan pendapat dan pikiran serta kewajiban setiap orang untuk mendengar pendapat dan pikiran orang lain... jika potensi setiap orang untuk benar dan baik mengakibatkan adanya hak untuk memilih dan menyatakan pendapat, potensi setiap orang untuk salah dan keliru ( karena kelemahanya sebagaimana dikemukakan di atas) mengakibatkan adanya kewajiban untuk mendengar pendapat orang lain."<sup>19</sup>

Muhammad AS hikam memahami konsep *civil society* sebagai kekuatan pengimbang (*balancing force*) atas kekuatan negara. Gramsci dan Tocquenville

<sup>18</sup> *Ibid*, 229.

<sup>19</sup> *Ibid*, 233.

merupakan modal yang dijadikan acuan dalam pengalaman Eropa Timur, seperti dipahami Hikam, maka yang ditekankan dan dijadikan acuan di sini adalah model yang sesuai dengan penafsirannya tentang konsep ummah, terutama yang berkaitan dengan fungsi ummah "membangun kohesi sosial" dan "fisi transendensi"-nya, seperti yang dibacannya dari persepektif Kuntowijoyo.

### **B. Konsep Thomas Hobbes Tentang *Civil Society*.**

Dalam perkembangan *civil society* pernah dipahami secara radikal oleh para pemikir politik yakni dengan menekankan aspek kemandirian dan perbedaan posisinya sedemikian rupa sehingga menjadi antitesis dari *state*. Pemahaman seperti ini mengundang reaksi para pemikir seperti Hegel yang segera mengajukan tesis bahwa *civil society* tidak bisa dibiarkan tanpa terkontrol. *Civil society* justru memerlukan berbagai macam aturan dan pembatasan-pembatasan serta penyatuan dengan negara lewat kontrol hukum, administratif dan politik. Pandangan Hegel tentang *civil society*, yang ia samakan dengan *buergerliche Gessellschaft*, belakangan menandatangani dukungan kuat, termasuk dari Karl Marx.

Namun konsepsi Hegelian dan Marxian tentang *civil society* yang bercorak sosiologis itu menimbulkan persoalan, karena ia mengabaikan dimensi kemandirian yang intinya. Ini disebabkan, terutama pada Hegel, posisi negara dianggap sebagai ukuran terakhir dan pemilik ide universal.

Istilah *civil society* ( masyarakat sipil ) secara substansial sudah ada sejak zaman Aristoteles, yakni suatu masyarakat yang dipimpin dan tunduk pada hukum.

Penguasa, rakyat, dan siapa pun, menurut Aristoteles, harus taat dan patuh pada hukum yang telah dibuat secara bersama-sama. bagi Aristoteles, siapapun bisa memimpin negara secara bergiliran dengan syarat ia bisa memimpin dengan adil. Dan keadilan baru bisa ditegakkan apa bila di setiap tindakan didasarkan pada hukum. Jadi hukum merupakan ikatan moral yang bisa membimbing manusia agar senantiasa berbuat adil.<sup>21</sup>

Adam Ferguson melihat *civil society* sebagai gagasan alternatif untuk memelihara tanggung jawab dan kohesi sosial serta menghindari ancaman negatif individualism, berupa benturan ambisi dan kepentingan pribadi. *civil society* dipahami sebagai entitas yang syarat dengan sifat etis berupa solider dan kasih sayang antar sesama.

Menurut Hobbes dalam *civil society*, hidup dan hak milik dilindungi oleh hukum dari manusia lain, tetapi bukan dari negara (*state*). *Civil society* seperti itu akan menjadi pernyataan yang tidak logis, kata Hobbes, untuk negara dibatasi oleh hukum, untuk negara itu sendiri adalah pembuat hukum.<sup>22</sup>

Dengan demikian menurut Hobbes, negara merupakan pembuat hukum yang mengatur masyarakat. Di mana negara tidak dibatasi oleh hukum. Akan tetapi dalam negeri itu harus ada perundang-undangan yang mengatur masyarakat,

<sup>21</sup> Din Syamsuddin, *Etika Agama .....*, IV.

<sup>22</sup>H. S. Gordon, *History and Philosophy of Social Science* (New York ; Routledge 1991). 75.

sehingga masyarakat, tidak terjadi perang total, karena adanya kebebasan kehendak hati.

Hobbes sama dengan Locke, menempatkan *civil society* sebagai penyelesai dan peredam konflik dalam masyarakat. Jadi *civil society* disamakan dengan negara...<sup>22</sup> Negara merupakan entitas yang menyeluruh yang di dalamnya ada penguasa, rakyat, dan seperangkat aturan yang saling bau-membau. Merupakan masyarakat yang berskala besar dengan mencerminkan keideallan suatu bentuk masyarakat. Yaitu masyarakat, yang kuat, aman, damai dan sejahtera. Bahwa tanpa negara, dan perjanjian atau kontrak maka *civil society* tidak akan terwujud, yang terjadi adalah perang dengan kehendak sendiri-sendiri.

Dalam teori Hobbes ditemukan anggapan dasar bahwa manusia pada hakekatnya egois, merupakan makhluk yang telah ditentukan (*Determined creature*), akan tetapi mampu bertindak rasional -yang sebenarnya merupakan asumsi-asumsi yang masuk merembes masuk ke dalam banyak teori naturalistik enggan mengungkapkan pandangan bahwa manusia pada dasarnya bersifat egois, tetapi secara tidak langsung mereka akan mengatakan bahwa manusia perlu dihambat oleh masyarakat. Orang terutama dilihat sebagai makhluk yang lebih merupakan produk dari aturan-aturan sosial, ketimbang sebagai makhluk yang lebih merupakan produk dari aturan-aturan sosial, ketimbang sebagai makhluk

---

<sup>22</sup> Ahmad Baso, *Civil Society* ..., 122.

yang mampu membentuk dan merencanakan dunia sosial mereka sendiri. Sebagaimana dengan Hobbes, sosiolog naturalistis juga melihat rasionalitas terdapat dalam diri manusia-rasionalitas yang digunakan sebagai sarana penting untuk menjamin tercapainya tujuan yang diinginkan.<sup>23</sup>

☺ Manusia secara alamiah, menurut Hobbes, mempunyai sifat tamak, rakus dan ingin menguasai yang lain dan dalam diri manusia juga ingin sesuatu perlindungan karena merasa cemas karena ingin memusuhi dan memiliki maka dengan rasional, manusia ingin damai dan bahagia yaitu sebagai masyarakat yang ideal akan terwujudnya *civil society*.

Nalar memungkinkan hakekat manusia yang malang ini diatasi dan membiarkan konflik yang keras itu diubah ke dalam kerja sama tanpa kekerasan (*non violent cooperation*). Hal ini dilaksanakan melalui pembentukan suatu negara politik (*political state*) yang melindungi rakyatnya dari hakekat nafsu dan kelemahan mereka sendiri. Dengan demikian, menurut Hobbes, manusia sebenarnya gila perang dan mementingkan diri sendiri, tetapi membutuhkan keselamatan. Masyarakat, berkembang untuk merintangai nafsu manusia dan mensosialisir mereka ke dalam kepatuhan.<sup>24</sup>

Analisis terhadap aspek manusia dan kebebasan otoriterisme memaksa kita

---

<sup>23</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*. Terj. Tim Penerjemah Vasoma-Ed. II. cet-4 (Jakarta : Grafindo Persada, 2000) 9.

<sup>24</sup> *Ibid.*

untuk mempertimbangkan masalah umum, yakni peran yang dimainkan faktor-faktor psikologis, ekonomis, dan ideologis dalam proses sosial. Upaya yang memahami gerakan yang dilakukan Fasis terhadap negara-negara besar memaksa kita untuk mengakui peran faktor-faktor psikologis. Karena kita di sini berurusan dengan sistem politik yang pada dasarnya, tidak menarik bagi kekuatan-kekuatan rasional dari kepentingan diri sendiri, melainkan sistem politik yang memunculkan dan menyerahkan kekuatan-kekuatan jahat manusia yang kita yakini menjadi hampa, atau setidaknya telah lama mati. Gambaran yang terkenal mengenai manusia pada abad terakhir adalah salah satu makhluk rasional yang tindakan-tindakannya ditentukan oleh kepentingannya sendiri itu. Bahkan penulis seperti Hobbes, orang yang mengakui hasrat untuk kuasa dan permusuhan merupakan kekuatan yang mendorong manusia, menjelaskan bahwa eksistensi kekuatan ini merupakan hasil logis dari kepentingan diri sendiri. Karena manusia itu sama dan karena tidak ada kekayaan untuk merumuskan mereka dengan tingkat yang sama, mereka merasa perlu menyerang pihak lain dan ingin berkuasa untuk melindungi kenikmatan masa depan yang mereka punyai saat itu.<sup>25</sup>

Bagi beberapa peneliti, sadisme nampak tidak begitu menimbulkan teka-teki dibanding dengan mosokisme. Bahwa seseorang melukai orang lain atau menguasai mereka nampaknya cukup hakiki, walaupun tidak untuk

---

<sup>25</sup> Erich Fromm, *Lari dari Kebebasan* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997). 5 - 6.

“dimanfaatkan” Hobbes menganggap sadisme sebagai “ kecenderungan umum umat manusia “ eksistensi dari hasrat abadi dan gelisah untuk berkuasa setelah kekuasaan akhirnya berhenti dan kematian. Bagi Hobbes hasrat untuk berkuasa bukan merupakan kualitas kejam, melainkan akibat paling rasional dari hasrat manusia untuk kenikmatan dan keagamaan. Dari Hobbes sampai Hitler, orang menjelaskan hasrat untuk mendominasi merupakan akibat logis dari perjuangan untuk tetap hidup bagi yang paling kuat yang di kondisikan secara biologis, keinginan untuk kekuasaan dijelaskan sebagai bagian dari watak manusia.<sup>26</sup>

Keegoisan manusia itu, mereka menjalin hubungan dengan manusia lain dan membentuk masyarakat. Dengan kontrak sosial yang imbas dari perbuatannya itu akan kembali bermanfaat bagi pribadinya. Karena Hobbes dalam bukunya, Leviathan mengemukakan bahwa dalam kehidupan alamiah (*state of nature*) semua manusia memiliki kebebasan penuh untuk berbuat sekehendaknya. Tetapi kebebasan tersebut membuat hubungan antara mereka selalu diliputi oleh suasana permusuhan, oleh karena kepentingan mereka tidak selalu sama dan bahkan sering bertentangan kerunyaman timbul sebagai akibat masing-masing orang menggunakan kebebasan untuk berbuat semaunya.<sup>27</sup>

☑ Dengan metode mekanis – geometris Thomas Hobbes menginginkan

<sup>26</sup> Erich Fromm, *Lari dari Kebebasan...*, 150-151.

<sup>27</sup> H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI-Press, 1993) 68.

bagaimana dapat merintangikan dalam membuat manusia ke dalam suatu tatanan yang patuh, bukan takut kepada sesama tetapi takut pada aturan- aturan yang nantinya semua masyarakat aman dan damai serta adil. Itu semua memerlukan proses yang tidak mudah. Melihat dari karakter manusia itulah Hobbes kemudian dengan kontrak sosialnya dapat mewujudkan *civil society*.

### **C. Proses Terbentuknya Civil Society Menurut Thomas Hobbes.**

Dalam membangun suatu tatanan kehidupan yang ideal, perlu adanya suatu proses yang panjang, perlu adanya revolusi dan evolusi dalam diri manusia. Ketika dalam keadaan alamiah yang bebas dan dengan akalnyapun dapat merubah dirinya pada suatu kondisi yang mekanis yang selalu diatur, maka proses *civil society* terjalin sebagai berikut :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### **1. Karakter Manusia dan Munculnya Negara**

Kontrak sosial yang merupakan konsep Thomas Hobbes untuk menjadikan *civil society* sangat berhubungan erat dengan karakter manusia atau tabiat manusia. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial akan tetapi bagi Hobbes manusia adalah sebuah mesin anti sosial oleh sebab itu manusia menjadi pusat segala persoalan sosial politik. Menurutnya untuk memahami manusia tidak bisa didekati dengan pendekatan normatif religius karena pendekatan seperti ini seakan menjauhkan kita dari realitas sosial. Cara terbaik mendekati manusia adalah dengan melihat manusia sebagai

sebuah alat mekanis dan memahaminya dari pendekatan *Matematis-Geometris*.

Galileo mengatakan bahwa menurutnya prinsip gerak (Teori gerak yang ditemukan) alam semesta merupakan sebuah mesin raksasa. Willem Harney, penemu sirkulasi darah, mengatakan bahwa manusia tidak lebih dari mesin- mesin kecil. Pandangan Hobbes tentang manusia sangat dipengaruhi oleh kedua tokoh di atas, akan tetapi ada perbedaannya.<sup>28</sup> Manusia sebagai bagian alam tidak lebih dari mesin-mesin kecil yang berada dalam sebuah masyarakat. Begitu pula dalam diri manusia, menurut Hobbes bahwa tubuh manusia adalah hanyalah mesin-mesin mekanis, akan tetapi dia menambahkan bahwa manusia adalah mesin-mesin yang berfikir. Manusia memiliki akal, berbeda dengan hewan yang hanya memiliki naluri. Dengan akal manusia dapat memiliki prediksi, kalkulasi, refleksi- refleksi yang didukung dengan sejumlah argumen. Jika manusia hanya memiliki naluri, niscaya mereka hanya akan saling menghancurkan.

Kehidupan alam manusia dalam fitrah dan tabiat manusia bebas, tanpa adanya hambatan dan batasan-batasan apapun, keadaan seperti ini mengganbarkan permusuhan segi tiga antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Dalam keadaan semacam ini, manusia adalah sama dan setara. Yang

---

<sup>28</sup> Ahmad Suhelmi, M.A., *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan* (Jakarta: Darul Falah, 1999) 172.

kuat tidak selamanya merasa aman, sebaliknya yang lemah suatu saat dapat mengalahkan yang kuat. Manusia bertindak semata-mata mengikuti keinginan-keinginannya yaitu untuk memuaskan hawa nafsunya. Manusia bertindak semata-mata mengikuti keinginan-keinginannya yaitu untuk memuaskan hawa nafsunya. Manusia selalu menemukan jalan dan cara untuk mencapai apapun yang membuatnya senang dan bahagia. Sebaliknya, karena naluri itu pula dia berusaha dengan jalan apapun untuk menghindari apapun yang tidak disukainya atau yang sekiranya mengancam dirinya. Maka menurut Hobbes, kehidupan manusia hanyalah suatu usaha terus menerus untuk memuaskan hawa nafsu, mencari kebahagiaan dan menghindari apa yang tidak disukainya.

Hobbes tidak menafikkan adanya pertimbangan rasional atau akal budi. Namun pertimbangan tersebut hanya akan menghasilkan hukum alam, dimana manusia menjaga harga diri agar tidak terjerumus dalam kehancuran sebagaimana diungkapkan dalam Encyclopedia Britanica : *'A Law of Natural, lex, naturalis, is aprecept, or general and, found out by reason, by which is destructive.'*<sup>29</sup> Jadi manusia berbuat untuk kepentingan sendiri tanpa memperhatikan kepentingan bersama.

→ Hakekat alamiah yang melekat pada diri manusia akan melahirkan

---

<sup>29</sup> Thomas Hobbes, *Leviathan* Chap. XIV, Part I Edited by Neller Fuller da Great of Western Ghicago: Dent, 1986) 86.

persaingan dan kompetisi sesama manusia. Untuk mendapatkan kepuasan kebahagiaan dan menghindari penderitaan, manusia akan berhadapan dengan manusia lain, karena hidup ini merupakan persaingan, bagi mereka yang kalah akan tersingkirkan dan yang menang akan berkuasa.

→ Menurut Hobbes persaingan tersebut akan menghasilkan rangsangan-rangsangan alamiah untuk menggunakan kekuasaan yang dimiliki manusia. Manusia cenderung menggunakan kekuasaan dalam persaingan ini. Oleh karena itu, kehidupan manusia selalu diwarnai dengan persaingan dan konflik kekuasaan. Karena kekuasaan identik dengan kekerasan, maka kekerasan menjadi senjata ampuh yang digunakan dalam persaingan dan konflik ini. Dalam keadaan alamiah manusia saling memerangi antara yang satu dengan yang lainnya. Hobbes mengatakan manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*Homo homini lupus*). Akhirnya akan timbul perang antar semua melawan semua orang (*Gelum omnium contra omnes*).<sup>30</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Keinginan untuk mempertahankan hidup dan terhindar dari kematian tragis merupakan motivasi lain yang mendorong manusia untuk meninggalkan keadaan alamiah dan membentuk masyarakat politik (*political society*) di sinilah akal berperan. Dalam keadaan alamiah, manusia saling membunuh, sesuatu yang sebenarnya tidak dikehendaki manusia. Akal manusia menurut

---

<sup>30</sup> Franz Magnis-Suseno, *Berfilsafat dalam Konteks* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992) 203.

Hobbes membimbing orang untuk berdamai. Damai adalah keadaan untuk dimana saya terjamin, dimana saya tidak terancam oleh paksaan, pemerkosaan dan maut. Konsekuensi keadaan tak berdamai adalah kematian, maka damai merupakan kepentingan vital... Damai merupakan prasarat suatu kehidupan yang berkualitas manusia.<sup>32</sup> Atas dasar itulah manusia merasa membutuhkan "kekuasaan bersama" ( *common power* ) yang dapat menghindari untuk saling bunuh. →

Ⓐ Dari argumen di atas, Hobbes berpendapat, bahwa terbentuknya suatu negara atau kedaulatan pada hakekatnya sebuah kontrak atau perjanjian sosial, dalam istilah Hobbes " *covenant*." Dalam perjanjian itu manusia atau individu secara suka rela menyerahkan hak-haknya. Mereka mengangkat penguasa yang berjuang melindungi dirinya dari kehancuran atau ancaman orang lain.

## 2. Kontrak sosial.

Hobbes adalah tokoh yang pertama kali di antara para tokoh perumus teori kontrak sosial, John Locke dan J.J Rousseau, ketiga tokoh ini sama lahir di masa transisi, masa peralihan di antara masa abad pertengahan menuju abad modern. Hobbes merumuskan teori kontrak sosial ini tidak terlepas dari faktor sosial politik yang terjadi di Inggris. Perang civil ( *civil war* ) dan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

perang agama menjadi faktor penting yang mendorong untuk merumuskan teori perjanjian sosial guna mengatasi persoalan yang terjadi di Inggris.

Setiap manusia dalam keadaan alami, memiliki hak alami yaitu kemerdekaan untuk berkuasa, manusia berhak melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya, tanpa adanya hambatan dan rintangan. Di satu sisi, keinginan untuk melangsungkan kehidupan yang merupakan kodrat manusia sebagai konsekuensinya apapun yang dinilai baik oleh akal dan manusia memiliki kemampuan untuk melakukannya, maka ia kerjakan. Manusia dengan akalnya dapat menemukan hukum dalam *lex naturalis*, yang dapat memberikan petunjuk berupa ketentuan umum ( *general rule* ) melarang kepada manusia berbuat kerusakan bagi dirinya. Akal adalah sarana atau alat yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan demi kebaikan dirinya sendiri, yaitu menghindarkan diri dari kerusakan dan melangsungkan kehidupan.

Menurut Hobbes akal mengajarkan orang untuk menghindarkan diri dari kehancuran, akal bukanlah merupakan kekuatan baru, akan tetapi kekuatan untuk mengatur, mengkalkulasi atau penghati-hati, sebagai sarana mencari jaminan keselamatan dari sifat tamak, rakus, serakah dan sifat ingin berkuasa. Naluri manusia tersebut sangat membahayakan bagi dirinya sendiri dan orang lain untuk membentuk sebuah masyarakat yang belum ada presidennya, semua biasa dipertimbangkan melalui akal.

Tetapi keadaan manusia, seperti diterangkan pada bagian yang sebelumnya, merupakan keadaan perang antara tiap orang dengan orang lainnya, dimana manusia diperintah oleh kemauan dan kehendaknya sendiri. Konsekuensinya, setiap orang memiliki hak terhadap apapun, berlanjut, tidak ada rasa aman bagi setiap orang, betapapun kuat dan bijaksananya, untuk hidup sepanjang masa. Akhirnya akal secara umum dapat mengambil pedoman, tiap orang, hendaknya mengusahakan damai selama ia mempunyai harapan untuk memperolehnya, maka ( hendaknya ) ia bisa mencari dan mempergunakan semua pertolongan dan keuntungan akibat perang.<sup>32</sup>

Inti dari hukum alam pertama yang ditemukan lewat akal ini bersifat sangat fundamental. Dimana setiap orang mencari kedamaian dan bersedia mengikutinya. Kedua sebagai jumlah hak alami dengan segala alat apapun kita bisa mempertahankan diri kita.

Hukum alam yang kedua selangkah lebih maju, yaitu bahwa manusia mau, bila orang lain mau, demi untuk kedamaian dan mempertahankan dirinya yang biasanya perlu, meletakkan hak ini kepada apa saja dan rasa puas dengan kemerdekaan orang lain, seperti ia biarkan orang lain mengakuinya berhadapan dengan dirinya.<sup>33</sup> Sebab, selama seperti orang memiliki hak untuk

---

<sup>32</sup> G.H. Sabine, *Teori-Teori Politik (2)*, Terj. Soewarno Hadiatmodjo (Bandung: Bina Cipta, 1981) 121.

<sup>33</sup> Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial* (Yogyakarta: Kanisius, 1994) 93.

berbuat sesuai kemauannya, selama itu orang dalam keadaan perang.

Apabila seseorang mengalihkan haknya atau menanggalkannya ini terjadi karena hak lain yang dialihkan kepadanya sebagai imbalan atau karena kebaikan lain yang ia harapkan ia terima dari dengan pengalihan itu. Sebab hal itu merupakan perbuatan sukarela. Tidak lain hanya bertujuan untuk suatu yang baik bagi dirinya sendiri. Pengalihan hak secara timbal balik adalah apa yang disebut orang sebagai perjanjian (*kontrak*).

“ adalah *authorise and give up my right of governing my, self, to his man, or to this assembly of men, on this condition, that you give up my right to him and authorise all his action in like manner.*”<sup>34</sup>

Oleh karena itu, diperlukan penguasa untuk mengatur kepentingan bersama. Pengangkatan penguasa melalui sebuah perjanjian bersama, dikenal dengan kontrak sosial. Adapun tujuannya adalah menyusun kekuasaan bersama (*common power*) guna memelihara kesepakatan-kesepakatan.

Dalam kepustakaan ilmu politik dikenal dan dibedakan dua perjanjian masyarakat yang sebenarnya dan perjanjian pemerintahan, perjanjian pertama membentuk badan kolektif yang melibatkan seluruh anggota masyarakat atau sosial yang sebenarnya. Dengan perjanjian semacam ini akan melahirkan masyarakat kecil. Dalam bahasa Inggris perjanjian ini disebut *social contract*.

---

<sup>34</sup> *Leviathan*, dalam *Encyclopedia Britannica*, 101 dan Suhelmi, 179.

Perjanjian masyarakat yang kedua, perjanjian pemerintahan, anggotanya bukan setiap individu. Anggota perjanjian kedua ini adalah badan kolektif yang telah dibentuk masyarakat besar ( negara ). Dalam perjanjian yang kedua ini mempunyai fungsi untuk memilih kepala negara.

a. Pelaku Kontrak Sosial

Politik yang syarat dengan kepentingan dan kekuasaan (*power authority*) selalu menjadi masalah sosial yang tidak ada habisnya untuk dibahas, bahkan teori politik sampai saat ini terus mengalami perkembangan dengan bukti ditemukannya teori-teori politik modern, misalnya teori konspirasi politik (*political konspiration theory*).<sup>36</sup>

Kontrak sosial merupakan salah satu teori klasik. Dalam literatur ilmu politik, kontrak sosial dimaksudkan dalam pembahasan masalah asal mula munculnya negara.<sup>37</sup> Teori kontrak sosial juga berfungsi untuk menelusuri dari manakah sebenarnya sumber kekuasaan teori ini sangat bermanfaat untuk menjawab diskursus sumber kekuasaan. Dalam pemikiran politik Islam dan Barat, teori kontrak sosial menjadi paradigma untuk membongkar mitos bahwa kekuasaan khalifah atau raja sama dengan atau

---

<sup>36</sup> Untuk lebih jelasnya, baca dalam F. Eickelman dan James Piscatoris, *Ekpresi Politik Moslem*, Terj. Rofik Suhud (Jakarta: Mizan, 1998) 18-19.

<sup>37</sup> Uraian mengenai teori asal mulanya negara ada dalam, Iswara, *Pengantar Ilmu Politik* (136-160) dan Hutahuruk, *Azas-azas Ilmu Negara* (Jakarta: Erlangga, 1993) 19-33.

berasal dari kekuasaan Tuhan (*Divine sovereignty*).<sup>37</sup>

Berawal dari pendapatnya Hobbes tentang manusia, bahwa manusia adalah suatu alat mekanis yang perlu didamaikan, hobbes memandang kontrak sosial dilakukan semata-mata hanya antara rakyat dengan rakyat, negara sama sekali tidak terlibat dalam kontrak ini. Pendapat Hobbes ini merujuk pada keadaan alamiah (*state of nature*), dimana setiap manusia memiliki hak kebebasan yang bersifat mutlak. Setiap manusia berhak memiliki sesuatu apapun, termasuk yang dimiliki oleh orang lain.<sup>38</sup> Kondisi semacam ini tentunya berakibat pada kompetisi dan persaingan, bukan tak segan-segan menggunakan kekerasan.

Dalam hidupnya manusia, selalu diliputi dengan rasa ketakutan dan kecemasan. Meskipun secara fisik manusia kuat, namun rasa kedamaian dan ketakutan tidak pernah dimilikinya, karena suatu saat akan di kalahkan oleh orang lainnya.

Dengan pertimbangan akalnya manusia mampu menemukan hukum alam, *lex naturalis*. Hukum alam tersebut berupa ketentuan umum melarang manusia berbuat kerusakan bagi dirinya. Akal merupakan sarana yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk kebaikan dirinya sendiri, yaitu menghindarkan diri dari kerusakan dan malangsunngkan

<sup>37</sup> Tom Campbell, *Tujuh Teori...*, 49.

<sup>38</sup> *Leviathan* dalam *Encyclopedia Britannica*, 101 dan Suhelmi, 179.

kehidupan. Pada hakekatnya, setiap orang menginginkan ketentraman dan kedamaian dalam hidupnya. Hal ini hanya bisa dicapai, jika setiap orang bersedia meninggalkan hak kebebasan mutlak yang dimilikinya.

— Dengan kesadaran yang ada dalam dirinya untuk mendapatkan kehidupan yang aman dan damai, setiap individu menyerahkan haknya kepada penguasa. Kesepakatan ini semata-mata dilakukan antara individu dengan individu atau antara rakyat, penguasa tidak terlibat dalam kontrak sosial.<sup>40</sup> Penyerahan hak ini dilakukan agar setiap individu mendapatkan kehidupan yang tenteram dan damai. Kesepakatan ini semata-mata didasarkan atas motif individu dan setiap individu tidak terikat dengankesepakatan, akan tetapi terhadap keadaan damai yang dicita-citakan bersama.

#### **b. Posisi Rakyat dan Negara dalam Kontrak Sosial**

Hobbes yang memandang bahwa kontrak sosial, semata-mata dilakukan oleh rakyat, dengan menyerahkan seluruh hak yang dimilikinya pada raja dan dewan.<sup>41</sup> Akibat penyerahan secara mutlak tersebut, raja mempunyai kekuasaan yang bersifat absolut. Jelas di sini, bahwa kesepakatan tersebut dibuat secara bersama antara rakyat dengan rakyat, dan posisi negara berada di luar kontrak sosial.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Leviathan* dalam Encyclopedia Britannica.

Hobbes tidak menjelaskan secara detail teknis pengangkatan raja melalui kontrak sosial, sebagaimana Mawardi. Akan tetapi dalam literatur politik, kontrak sosial dilakukan dengan dua tahapan.<sup>42</sup> Pertama perjanjian masyarakat sebenarnya dan kedua perjanjian pemerintahan. Pada tahap pertama melibatkan seluruh anggota dengan membentuk badan kolektif. Sedangkan dalam tahap kedua tidak lagi melibatkan seluruh anggota masyarakat, akan tetapi badan kolektif yang telah dibentuk oleh masyarakat.

Mengenai quorum yang dibutuhkan untuk pengangkatan seorang raja atau dewan, Hobbes berpendapat, yang dijadikan pegangan adalah suara mayoritas.<sup>43</sup> Ketika mayoritas rakyat menyetujui untuk mengangkat salah satu orang di antara mereka, maka dia sah menjadi penguasa. Lebih jauh Hobbes tidak menjelaskan syarat-syarat seorang raja,

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

berbeda dengan Mawardi yang menjelaskan secara rinci.

### c. Hak dan Kewajiban antara Rakyat dan Negara.

Bagi Hobbes, kontrak sosial dilakukan dengan cara penyerahan hak kebebasan individu. Hal ini semata-mata dilakukan antara individu yang menyerahkan kebebasan yang dimilikinya kepada seorang raja atau dewan. Individu sudah diserahkan secara penuh kepada negara. Konsekuensi dari

---

<sup>42</sup> *Leviathan*, dalam *Encyclopedia Britannica*.

<sup>43</sup> Hutaeruk, *Azas-azas Ilmu ...*, 21.

keberadaan tidak terlibat dalam kontrak, maka negara memiliki hak penuh dan minus kewajiban.

Negara berhak menentukan sistem nilai baik dan buruk, membuat normal dan aturan-aturan hukum. Hobbes membolehkan pelembagaan kekerasan sebagai alat untuk menegakkan hukum. Menurutnya kekuasaan tanpa pedang banyak akan menjadi kata-kata belaka.<sup>43</sup> Negara juga berhak menentukan sumber-sumber ekonomi yang boleh dikuasai oleh rakyat dan menyelesaikan persengketaan antar warganya, karena hanya negara yang memiliki kuasa yang mutlak. Rakyat harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan hukum dan kebijakan yang tidak ditetapkan oleh negara.

Dia juga berpendapat bahwa rakyat diperbolehkan menentang negara, ketika negara memerintahkan rakyatnya melakukan sesuatu yang dapat merusak dirinya rakyat berhak menolak perintah negara untuk pergi perang, karena membahayakan dirinya. Hal ini disebabkan menyalahi motif setiap individu ketika mengadakan kontrak sosial, dengan menyerahkan semua haknya agar mendapatkan jaminan keamanan, ketentraman dan kedamaian hidup.

✕ Hobbes, berpendapat bahwa kholifah atau raja mempunyai hak dan wewenang menunjuk penggantinya. Menurut Hobbes, hak raja untuk

---

<sup>43</sup> Thomas Hobbes, *Leviathan* (Chicago, Dent, 1986) Bab XIV, 90 dan *Encyclopedia Britannica*, 99.

menunjuk dan mengangkat penggantinya berdasarkan atas kekuasaan raja yang bersifat mutlak.<sup>44</sup> Ketika masih dalam keadaan masyarakat alami (*state of nature*) yang berlaku adalah hukum rimba. Dengan pertimbangan akal nya manusia secara bersama-sama menginginkan kehidupan yang damai. Hal ini hanya bisa di capai dengan mengadakan kontrak sosial, menyerahkan seluruhnya hak yang dimilikinya kepada negara. Akibatnya otoritas dan wewenang raja bersifat mutlak termasuk menunjuk penggantinya. Hobbes tidak memberikan persyaratan, misalnya penunjukan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari seluruh atau mayoritas. Meskipun rakyat tidak menyetujuinya, tidak berpengaruh atas legalitas pengangkatan raja.

Dalam pandangan Hobbes Negara adalah stabil apabila undang-undangnya baik, dan berkuasaan dijalankan dengan tidak sewenang-wenang, tetapi syarat-syarat itu tidak dijamin secara institusional, kualitas undang-undang dan pemerintahan negara seluruhnya tergantung pada kesadaran penguasa.

---

<sup>44</sup> Suhelmi, *Pemikiran...*, 181.

## BAB IV

### ANALISA KONSEP THOMAS HOBBS

#### TENTANG CIVIL SOCIETY

##### A. Analisis Konsep Thomas Hobbes Tentang Terbentuknya Civil Society.

Latar belakang pemikiran Hobbes dan latar belakang sosialnya dapat dipahami, bahwa analisis Hobbes mengenai kodrat manusia tampak membuat hubungan-hubungan damai dan kerjasama antar manusia mustahil. Namun manusia membutuhkan masyarakat : sebagai anak ia tidak bisa hidup sendirian, dan sepanjang hidupnya dia perlu membantu orang-orang lain untuk bertahan hidup dan memperlengkapi diri secara memadai. Demikianlah, walaupun ia tidak memiliki rasa senang alamiah untuk bersekutu, dia sungguh membutuhkan dan menginginkan keuntungan-keuntungannya. Akibatnya kita secara kodrati tidak mencari masyarakat demi masyarakat itu sendiri, melainkan bahwa kita bisa menerima imbalan atau keuntungan tertentu dirinya. Inilah yang pertama-tama kita inginkan, lain-lainnya adalah sekunder.<sup>1</sup>

Pandangan manusia di atas dapat dipahami bahwa manusia mempunyai hasrat alamiah yaitu untuk mementingkan pribadi-pribadi yang secara alamiah tidak suka hidup bersama yang ada hanya saling menguasai, mengancam, takut dan kecemasan. Sehingga dapat diketahui bahwa *civil society* yang dicita-citakan

---

<sup>1</sup>Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial*, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), 92.

Hobbes adalah masyarakat yang aman dan bahagia. Untuk menemukan *civil society*. Hobbes mencari metode yang tidak terpengaruh oleh nafsu-nafsu manusia yaitu ditemukan dalam ilmu ukur yang disebut dengan metode mekanis geometris. Dimana dalam kehendak-kehendak manusia yang berbeda-beda dan motif yang berbeda pula dapat ditarik suatu benang merah yang nantinya, kehendak-kehendak itu dapat dihambat dengan adanya suatu hukum. Kebebasan kehendak tersebut dalam pemikiran Hobbes adalah kehendak alamiah (*state of nature*) yang selalu ingin berkuasa dan menguasai, yang mengancam dan terancam serta kecemasan pada individu atau kelompok dalam kehidupannya maka manusia dipandang Hobbes sebagai mesin-mesin anti sosial yang harus didamaikan untuk perdamaian.

Berbeda dengan Aristoteles, teorinya tentang masyarakat tidak menyimpang dari teorinya tentang manusia, dengan pendekatan biologis digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id mencakup analisis-analisis kenyataan-kenyataan menjadi bagian-bagiannya, dan mengelompokkannya menurut spesies dan genus. Jadi manusia merupakan binatang dengan unsur-unsur tertentu yang khas yaitu rasio dan tutur kata. Keduanya sangat penting untuk menyesuaikan diri dengan standart etis.

Konsep Hobbes jika dipahami, bahwa perkataan manusia dapat menimbulkan keresahan dan ketakutan, karena perkataan adalah identik dengan retorika yang selalu mengakibatkan penyalahgunaan pikiran ketimbang penalaran yang benar. Maka Hobbes berusaha menyamai ilmuwan-ilmuwan perintis contohnya, Galileo, Harvey dengan memilah-milah secara analitis menyusun unsur-unsur itu kembali dengan cara deduktif ketat. Dengan cara ini dia berharap

dapat menemukan unsur-unsur kodrat manusia yang menjadi penyebab-penyebab fenomena sosial.<sup>2</sup>

Dapat diketahui dari pandangan Hobbes tentang manusia di bab yang telah lalu, bahwa masyarakat sipil (*civil society*) yang dicita-citakan Hobbes adalah masyarakat yang aman dan bahagia. Untuk menciptakan *civil society*, atas dasar anthropologis, Hobbes membangun filsafatnya tentang negara sebagai *Leviathan* yang mutlak kekuasaannya yang menakutkan karena hanya dengan demikian ia dapat menertibkan manusia dan menjamin suatu kehidupan bersama yang aman dan demikian bahagia.<sup>3</sup>

Mengapa demikian, karena pada saat itu terjadi perang sipil yaitu perang antara agama, perang / pertentangan pihak parlemen dengan raja yang masing-masing ingin menanamkan pengaruhnya untuk kekuasaan.

Maka untuk mencapainya perlu diadakan kontrak sosial. Kontrak sosial bukan merupakan tujuan, akan tetapi merupakan alat atau instrumen untuk mencapai tujuan itu sendiri. Yang masing-masing individu harus melepaskan haknya karena Hobbes memandang bahwa manusia adalah mesin tanpa kebebasan dan akal budi, tanpa suara hati dan rasa tanggung jawab dan bahwa dengan demikian ia membangun tatanan sosial yang seakan-akan memandang semua warga negara hanya sebagai mekanisme-mekanisme yang perlu ditentramkan dan

---

<sup>2</sup>*Ibid*, 86.

<sup>3</sup>Franz dan Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, (Yogyakarta : Kanisius, 1992), 72.

diperlukan kekuasaan yang absolut dan otoriter, untuk menekankan kebebasan manusia yang semuanya sendiri tanpa aturan.

Menurut Hobbes kekuasaan tanpa pedang hanya akan menjadi omongan belaka. *"... covenants, without the sword are but word, and of no strength asecure a man at all"*<sup>4</sup>

Artinya, Suatu saat ada yang melanggar perjanjian harus ada hukum yang tegas dan keras sehingga negara hasil dari kontak sosial ini dapat bertahan. Karena telah dijelaskan bahwa individu-individu terpisah yang secara akal-sehat berlomba-lomba mengejar kepentingan mereka. Titik tolak berangkat seperti ini terlihat egoistik baik dalam pengkarakterisasian individu maupun dalam konstruksi metodologinya. Sosialitas muncul di dalamnya sebagai hasil lagis atau mencerminkan dari apa yang dibutuhkan oleh individu untuk menghindari konflik pribadinya ketika menuntut mereka terhadap kebebasan dan kemanusiaan. Akan tetapi karena keinginan untuk bertindak dengan kehendak sendiri itu lebih kuat dan perjanjian dengan hukum yang tidak tegas, maka perjanjian dapat bubar (gagal) oleh seseorang ondividu atau mayoritas yang melanggar perjanjian.

Maka dalam perjanjian harus terbentuk hukum dan tindakan hukum yang tegas, sehingga pelaku kontrak takut akan hukum yang diterapkan, bukan takut karena individu lain.

---

<sup>4</sup>Leviathan, dalam *Encyclopedia Britania*, 99.

Disini merupakan tugas negara memaksa rakyat untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati bersama. Menurut Hobbes negara diperbolehkan mengadakan cara apapun, termasuk kekerasan untuk menjaga kedamaian dan ketentraman. Dengan melembagakan alat-alat kekerasan, negara berhak memaksa warganya untuk patuh dan tunduk kepada aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan. Jika tidak ada kekuasaan yang dapat memaksa mereka, maka akan kembali dalam keadaan alamiah dan berlaku hukum rimba, yang kuat adalah yang paling berkuasa. Sebagaimana dalam keadaan manusia alamia tidak ada milikku dan milikmu.<sup>5</sup>

Karena dalam keadaan alami (*state of nature*) manusia ingin saling menguasai satu sama lain dan tidak ada yang melindungi dirinya dari pihak lain kecuali kekuatan dari dirinya sendiri. Jika ditimbang dari kekuasaan pribadi tidak sebanding dengan kekuatan kolektif (bersama), sehingga sangat penting untuk membentuk masyarakat demi perdamaian dengan peraturan hukum sebagai pengganti kekuatan fisik.

Tuntutan pokok Hobbes adalah senantiasa bahwa setiap masyarakat membutuhkan seorang penguasa tunggal dengan kekuatan legal yang tidak terbatas, akan tetapi ini tidaklah sama sekali berarti bahwa pemegang kekuatan

---

<sup>5</sup>Tom Campbell, *Tujuh Teori ...*, 94.

hanya menjalankan hukum.<sup>6</sup> Maksudnya bahwa setiap orang masih tetap memiliki permasalahan sejauh mana penguasa dapat atau harus menjamin kepatuhan yang diyakini atau dijanjikan akan hukum-hukumnya. Pemikiran bahwa setiap individu dapat memikirkan apa yang mereka senangi, dan menginginkan apa yang mereka sukai sejauh mereka masih dalam aturan-aturan hukum atau mematuhi hukum.

Untuk mewujudkan *civil society*, penguasa harus memperoleh nasehat terbaik mengenai jawabannya tentang hukum yang terbaik untuk membuat undang-undang mengenai masalah tertentu, merupakan pertanyaan yang terus terang dan dapat dijawab atas dasar pikiran sehat, oleh penguasa siapa pun yang memiliki pengetahuan memadai.<sup>7</sup> Dalam memilih penguasa, rakyat sebelumnya harus melihat kemampuan daripada wakilnya (penguasa yang akan disertai sebagian haknya), sehingga penguasa betul-betul paham apa kemauan rakyat dan mahir dalam mengendalikan kekuasaan (konflik yang terjadi) dan *civil society* akan terwujud.

Hobbes sama dengan Locke yakni menempatkan *civil society* sebagai penyelesaian dan peredam konflik dalam masyarakat, jadi *civil society* merupakan cerminan dari negara yang ideal yang di dalamnya ada keharmonisan.

---

<sup>6</sup>David Miller & Larry Siedentop, *Politik Dalam Persepsi pemikiran Filsafat dan Teori*, (Jakarta : Rajawali, 1986), 342.

<sup>7</sup>*Ibid*, 343.

Keharmonisan di sini dapat dilihat dari negara yang kuat, yang rakyatnya patuh pada penguasa.

Dalam konsep Plato, nasib negara bergantung kepada kebijaksanaan kepada negara yang harus seorang filosof.<sup>8</sup> Yang lebih menekankan pada kualitas kepala negara, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hobbes, hal ini akan mempengaruhi pula loyalitas dari warga negara terhadap penguasa.

Kewajiban rakyat adalah patuh dan tunduk terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan negara berupa kebijaksanaan meskipun kekuasaan bersifat absolut, akan tetapi rakyat diperbolehkan menentangnya, selama negara tidak memerintahkan tindakan-tindakan yang merusak diri-sendiri. Perintah yang dapat membahayakan jasmaniahnya ini bertentangan dengan tujuan kontrak sosial, oleh sebab itu rakyat diperbolehkan menentangnya, sebagaimana dikatakan Hobbes :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Membunuh, melukai ataupun merusak dirinya sendiri, atau memerintahkan untuk tidak mempertahankan diri bila diserang, atau (memerintahkan) untuk tidak makan makanan tidak menggunakan udara, obat atau benda-benda lain yang mau tidak mau harus dimakan atau dipergunakan agar dapat hidup.<sup>9</sup>

Jadi dapat didiskripsikan bahwa *civil society* dalam pandangan Hobbes adalah masyarakat yang demokrasi, dalam arti bebas mengeluarkan pendapat dan menentang suatu aturan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati,

<sup>8</sup>Syamsul Arifin, *Merambah Jalan Baru Islam* (Yogyakarta : ITTQA Press, 2000) 123.

<sup>9</sup>Diwar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Jakarta : Mizan, 1997) 4.

walaupun Hobbes membenci demokrasi. Untuk Hobbes salah satu keberatan penting terhadap demokrasi misalnya : adalah bahwa demokrasi selalu membutuhkan retorika dan retorika ini selalu mengakibatkan keputusan selalu lebih ditentukan oleh penyalagunaan pikiran (*impetus animi*) ketimbang oleh penalaran yang benar (*recta ration*).<sup>10</sup>

Akan tetapi *civil society* tadi perlu kekuasaan yang absolut dan kekerasan yang secara politis dapat / untuk mengaturnya, jika tidak, akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang akan mengacaukan keamanan dan ketentraman masyarakat, karena peraturan yang tidak tegas.

Sebagai contoh kontrak sosial yang sekarang telah hancur karena masyarakat sendiri dan sistem pemerintahan yang tidak jelas dan tidak tegas mengambil sikap, yaitu "*pela gandong*" suatu budaya yang telah mendarah daging di masyarakat propinsi Maluku, yang menjadi ikatan antara umat Islam dan Kristen.

Karena kebijakan pemerintah yang tidak tegas dan tidak otoriter lagi dan karena kebebasan dibuka lebar-lebar tanpa adanya penghambat, keadaan alamiah (*state of nature*) manusia seperti apa yang dikatakan Hobbes benar-benar terjadi, manusia kembali merasa ketakutan, kecemasan dan dikelilingi oleh suatu keadaan yang tidak menentu.

---

<sup>10</sup>Bambang Sugiharto, *Post Modernisme Tantangan Bagi Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius) I

Bagaimana mungkin terwujud *Civil society*, jika manusia hanya diliputi hasrat ingin berkuasa dan tidak senang dengan kekuasaan manusia lainnya. Dan tanpa adanya undang-undang yang mengatur manusia.

Jadi secara hermeneutik, konsep Thomas Hobbes tentang *civil society* dapat dipahami sebagai suatu masyarakat yang membentuk kesepakatan dengan undang-undang serta pelaku-pelaku hukum yang bertindak tegas tidak sewenang-wenang. Sebagai bukti hasil kontrak sosial juga, adalah lahirnya Pancasila dan UUD 45. Bahwa dengan undang-undang dan penguasa yang absolut dan otoriter akan menelorkan *civil society*, suatu negara yang mendominasi kelompok-kelompok lain.

Pandangan Dewey, terhadap teori Hobbes, bahwa "*war of all against all*" (Perang semua melawan semua) yang disebut oleh Hobbes hanyalah sebuah mitos. **Tidak ada satupun komunitas masyarakat, yang lahir dari perang semua melawan semua.**<sup>11</sup>

Justru, masuk akal jika masyarakat terbentuk karena adanya pertentangan, ketika perang lama kelemahan manusia akan merasa terancam, takut dan ingin menguasai yang lemah dan disitulah manusia akan bosan dan merasa buruk, ingin damai dan terbebas dari ancaman. Maka melalui berbagai jalur mereka ingin

---

<sup>11</sup>Sidney Hook, *Sosok Filsafat Humanis Demokrat Dalam Tradisi Pragmatisme Sebuah Bunga Rampai*, Ed. Paul Kurtz, Terj. Ignatius Gatut dan Avi Mahaningtyas, *Pengantar* Y.B. Mangun Wijaya (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994) 214

berhenti dari keadaan perang dan membentuk kontrak sosial (*social contract*) agar jiwa dan hartanya hak miliknya terjamin keamanan dan keselamatannya, dengan kesepakatan bersama. Maka lahirlah suatu masyarakat yang memiliki hukum (*civil law*), yang dipimpin oleh seorang penguasa yang dipilih oleh individu-individu, saat itulah kehidupan (sistem) demokratis terjadi.

## B. Prospektif Civil Society Thomas Hobbes

*Civil society* Thomas Hobbes dilihat dari kaca mata Islam, tidak banyak bertentangan. Dalam Islam, manusia membentuk suatu masyarakat mempunyai tujuan yaitu suatu kebahagiaan dan ketenteraman yang hakiki. Kebahagiaan itu tentu saja diperoleh dengan suatu instrumen yaitu suatu bentuk perserikatan atau perjanjian perdamaian.

*Civil society* Thomas Hobbes dalam kaca mata Islam dapat ditinjau dari beberapa segi, dalam mamantau teori dan praktisnya, sehingga dapat ditarik suatu benang merah untuk melangkah pada prospek ke depan.

### 1. Manusia Secara Psikologis

Manusia secara psikologis mempunyai potensi untuk melakukan perbuatan yang keji, sebagai bukti, Allah menciptakan siang malam, baik buruk, perbuatan jahat dan baik.

Ketika Allah SWT, memberitakan kehendaknya, menciptakan khalifah di bumi, para malaikat secara demonstratif menyatakan ketidak-setujuannya.

Alasannya manusia akan merusak. Tetapi dengan tegas Allah SWT. Memaklumkan bahwa ketakutan malaikat itu tidak sepenuhnya beralasan.

Kecemasan malaikat itu menjadi kenyataan. Generasi pertama manusia anak-anak Adam as. yakni Qabil dan Habil sebagai buktinya. Mereka saling bunuh, dengan alasan Adam telah keliru menjodohkan saudara kembarnya, Habil. Kemudian Qabil membunuh Habil. Di sinilah pertarungan antara kebajikan dan kebatilan dimulai.<sup>12</sup>

Tetapi untuk mengembalikan kehidupan manusia pada suasana yang harmonis dan damai tentu bukanlah suatu hal yang mustahil. Perwujudannya harus terlahir dari suatu masyarakat yang cerdas, yang pola hidupnya berlandaskan rasionalitas dan moralitas.

Hobbes memandang manusia dikendalikan oleh nafsu-nafsu yang bersifat rakus, cemas, takut, dan bersaing untuk mendapatkan apa yang diinginkan dalam bukunya *Leviathan* disebutkan : *"So that in the nature man, we find three principal causes of quarrel, first, competition, second for safety ; and the thrid, for reputation. ... Here by it is manifest that during the time menlive without common power to keep them allina we, the are in that condition which is called war."*<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Lihat Qs. Al-Maidah ayat 27-30

<sup>13</sup>Thomas Hobbes, *Leviathan Chap : 13 Part I, Edited by Nelle Fuller da Great of The Western* (Chicago : 1986) 85.

Pada dasarnya manusia mempunyai potensi alami suatu peperangan seperti yang dikatakan Hobbes dalam buku *Lari Dari Kebebasan*, Eric Fromm.

Demikian juga dalam Islam manusia dalam dirinya terdapat nafsu-nafsu. Dalam bukunya Abdul Mujib, *Fitrah dan Kepribadian Manusia*, tentang kepribadian *lawwamah* dan *Ammarah*.<sup>14</sup> Kepribadian *Ammarah* adalah kepribadian yang cenderung pada tabiat jasad dan mengejar prinsip-prinsip kenikmatan (*pleasure principle*). Sehingga menunggu manusia untuk menjadi tingkat *lawwamah* tanpa paksaan dari luar itu adalah sama halnya membiarkan diri kita hancur.

Dalam keadaan seperti diatas akan rawan terjadinya kehidupan yang anarkis, sehingga untuk menghindari dari hal tersebut, manusia meski membangun sebuah organisasi pemerintahan yang memungkinkannya terhindarnya dari situasi yang kacau itu. Menurut Taimiyyah kesejahteraan dan kebahagiaan manusia juga bakal tergugah jika ia tergabung dalam sebuah komunitas. Di dalam komunitas itu, ia memiliki peluang dan kesempatan membangun kehidupan dan interaksi sosial yang ditandai dengan tolong menolong dan gotong royong. Dalam konteks inilah, manusia ibarat makhluk politik (*homo politicus*) yang terbentuk secara alamiah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Mujib, *Fitrah & Kepribadian Islam Suatu Pendekatan psikologi Pengantar Zakiah Daradjat*, (Jakarta : Darul Falah, 1999) 162-167

<sup>15</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, 1999) 5.

Konsep Ibnu Taimiyyah mengenai kebutuhan manusia akan negara didasarkan pada akal dan hadits. Argumen rasionalnya terletak pada kebutuhan universal semua manusia untuk bergabung, bekerja sama dan menikmati berbagai manfaat kepemimpinan tanpa peduli apakah mereka menganut suatu agama atau tidak. Argumen rasional itu juga diperkuat landasan sunnah Nabi SAW. (hadits). Ia mengajukan sejumlah sunnah atau hadits Nabi SAW, contohnya adalah sabda Nabi SAW, "bila tiga orang melakukan perjalanan, maka salah seorang di antara mereka selayaknya menjadi pemimpin", dan juga sabda sabda beliau, "Enam puluh tahun berada dibawah tirani lebih baik daripada semalam tanpa pemerintahan."<sup>16</sup>

Itu menandakan bahwa mau tidak mau setiap individu mempunyai tabiat-tabiat yang saling berlawanan, yaitu tabiat buruk yang cenderung untuk merusak kehidupan diri-sendiri dan juga orang lain terlebih lagi merusak tatanan masyarakat seperti halnya Nabi disaat adanya kekacauan dalam masyarakat beliau mengeluarkan suatu perjanjian dengan wujud "Piagam Madinah" (Madinah Charter).

Pada dasarnya *civil society* itu perlu pembatasan kebebasan yaitu kebebasan alamiah yang dimiliki oleh pihak lain yaitu bukan hanya dari individu lain tetapi dari negara (penguasa). Walaupun pemerintahan yang tirani

---

<sup>16</sup> *Ibid*, 55.

sekalipun, jika manusia tidak ada aturan atau *civil law* dalam hidupnya, mereka akan kalang kabut, dan akan membuat hukum sendiri-sendiri.

Demikian juga al-Farabi, memandang *civil society* (madinah), sebagai masyarakat utama, (al Madinah al Fadilah) al Farabi menggambarkan masyarakat utama tersebut sebagai suatu masyarakat yang lewat perserikatan manusia yang ada di dalamnya, bertujuan untuk menegakkan persatuan dan kesatuan sebagai kebahagiaan hakiki dapat terwujud dalam hal ini, al Farabi menekankan perlunya kolektifitas sosial dengan etika kolektif dalam mencapai nilai etika tertinggi yaitu kebahagiaan hakiki (*al-sha'adah al-Haqiqiyah*).<sup>17</sup>

Ikwan al Safa menekankan peran dan fungsi politis dari masyarakat. Dalam pandangan mereka, "masyarakat utama merupakan tujuan akhir dari rezim politik, karena politik harus diselenggarakan dengan dan bermuara pada etika (akhlak) : Akhlak adalah politik kejiwaan (siyasad al nays) yang merupakan landasan bagi semua politik."<sup>18</sup>

Menurut Ibnu Khaldun manusia adalah makhluk "politik" atau sosial<sup>19</sup> sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka individu membentuk suatu organisasi dan

---

<sup>17</sup> M. Din Syamsuddin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta : Logos, 2000) 98.

<sup>18</sup> *Ibid*, 99.

<sup>19</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah & Pemikiran Ed. 5* (Jakarta : UI-Press, 199) 99.

membutuhkan seorang yang berpengaruh dapat bertindak sebagai penengah antara manusia. Sehingga memerlukan pemimpin dari masyarakat itu sendiri dan harus mempunyai kekuasaan dan otoritas atas mereka, dengan demikian tidak ada seorang pun di antara anggota masyarakat dapat mengganggu atau menyerang selama anggota masyarakat yang lain. Tokoh yang mempunyai kekuasaan dan wibawa memungkinkannya bertindak sebagai penengah, pemisah dan sekaligus hakim itu adalah raja atau kepala negara.<sup>20</sup>

Jadi analisa penulis terhadap konsep Hobbes ditinjau dari psikologi jika dilihat dari kacamata Islam, bahwa dalam Islam menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang secara alami dapat membentuk masyarakat tanpa paksaan dari pihak / faktor lain, akan tetapi dibalik itu secara alami pula manusia menginginkan apa yang dimiliki orang lain dan tamak, konsep Hobbes manusia anti sosial membentuk masyarakat bukan karena dorongan alamiah tetapi hanya bersifat mekanis saja, jika kembali pada keadaan alamiah, akan kembali pada perang (*civil war*), *civil society* mustahil akan terwujud, jika tidak ada penguasa.

Terlepas dari (*state of nature*) atau tidak, manusia berpotensi sangat tinggi untuk membuat kerusuhan, kecemasan, ketakutan dan tamak terhadap kekuasaan orang lain. Kontrol sosial (*social control*) sangat diperlukan dalam menangani dan menegakkan jalur hukum sebagai penguat *civil society*.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, 100-101.

Ketika Hobbes mencatat kengerian dan keadaan alamiah, yang paling buruk adalah ketakutan terhadap kematian karena kekerasan ; tetapi negara ada lebih sekedar untuk mempertahankan hidup, negara ada demi kehidupan luas, negara sebagai instrumen untuk membuat masyarakat menjadi beradab.

## 2. Dari Segi Ciri-ciri Civil Society

Jika dilihat dari Islam, *civil society* memiliki ciri-ciri ; seperti yang dikemukakan oleh M. As Hikam sebagai berikut merupakan wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi yang bercirikan antara lain : kesukarelaan (*Voluntaary*), keswasembadaan (*self generating*), dan keswadayaan (*self supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya.<sup>21</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Drs. Priyatmoko, Dosen Fisip Unair Surabaya, mengutip konsep yang sudah dibawah oleh Adam Ferguson, Filsuf Skotlandia, abad 19 : cita-cita *civil society*. Suatu masyarakat, yang mandiri, masyarakat yang bisa mengontrol dirinya, bebas sendiri, berorganisasi sendiri, bebas dari kekerasan.<sup>22</sup> Dan semua itu menurutnya hanya merupakan obsesi saja. Karena tidak pernah terealisasikan dalam kehidupan paktis.

---

<sup>21</sup>Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta : Pustaka 1 P3ES, 1996) 3.

<sup>22</sup>Din Syamsuddin, *Etika Agama ...*, vii.

Adapun Din Syamsuddin mengungkapkan ciri-ciri *civil society* antara lain : Kemandirian, toleransi, kesaudaraan, kerelaan menolong satu sama lain, dan menjunjung tinggi nama dan etika yang disepakati secara bersama-sama.

Hobbes, Hegel dan Locke, berpendapat bahwa *civil society* jika tanpa kordial adalah suatu, statemen yang omong kosong. Dalam *Leviathan* disebutkan :

*The fear of the former is in everyman his owne religion, which hath place in the nature of man before Civil society. The latter hath not so; at least not place enough to keep nature men to their promises, because in the condition of mere nature, the inequality of power is not discerned, but by the event of battle. So that before the time of Civil society, or in the interruption thereof by war, there is nothing can strengthen a covenant of peace agreed an against the temptation of avarice, ambition, lust or other strong desire, but agreed an against the temptation of avarice, ambition, lust or other strong desire, but the fear of that invisible power which they every one worship as god, and fear as a revenger of their perfidy.*<sup>23</sup>

digilib.uinsa.ac.id Ciri-ciri *civil society* Hobbes adalah mereka yang menciptakan

kesenangan fikiran bukan kepuasan hawa nafsu yang intinya adalah pengendalian diri. Dalam bukunya David Miller dan Larry. Disebutkan bahwa manfaat dari perdamaian dan keamanan ialah bahwa ia memungkinkan kita menikmati kesenangan yang beradab. Ini mengetahui bahwa kita penuh kedermawanan, ramah dan murah hati kepada yang memerlukan merupakan kesenangan yang disepakati Hobbes. Ini merupakan salah satu ganjaran dari tingkah laku yang pantas yang tidak ada dalam keadaan alamiah ; karena itulah

<sup>23</sup>Thomas Hobbes, *Leviathan*, 90.

ia tidak dipaksakan oleh pengawas atas diri kita, walaupun hal itu secara intrinsik menyerahkan kita kepada perdamaian, dan lebih lanjut mendorong kita pada kepatuhan karena kita merasakan ketergantungannya pada eksistensi ketertiban. Kita dapat melihat kembali bahwa penguasa tidak perlu melakukan segala sesuatu yang luar biasa untuk membuat kita bersikap damai dia tidak perlu terlibat dalam pengendalian pikiran atau dalam penemuan "puncak berita" karena pekerjaan pribadi kita akan selalu menyita seluruh perhatian kita.<sup>24</sup>

Jika dapat dipahami bahwa ciri-ciri *civil society* menurut Hobbes secara global adalah suatu masyarakat yang beradab, toleransi, patuh terhadap hukum, rela menyerahkan hak kepada penguasa, bebas berfikir (intelektual).

Artinya bahwa *civil society* Thomas Hobbes menekankan pada fungsi negara sebagai pengaman dari konflik akibat tabiat manusia yang tidak terkontrol. *civil society* Thomas Hobbes memiliki prospek kepada kemandirian setelah keadaan dalam suatu negara aman dan damai.

Jika ditinjau dari Islam *civil society* yang dikemukakan Hobbes akan memberi sumbangan terhadap *civil society* yang dikonsepsi oleh Islam. Walaupun konsep Hobbes banyak yang tidak pro karena mereka menyalahpahami tentang kebebasan. Bahwa dalam teori yang lain mengatakan bahwa *civil society* harus mandiri dan bebas dari hegemoni negara. Tetapi hemat penulis jika masyarakat sipil bebas dari hegemoni negara akan terjadi

<sup>24</sup>David Miller & Larry Scedentop, *Politik Dalam ...*, 358.

penyalahgunaan atau penghianatan terhadap negara yang kuat, artinya, rakyat patuh terhadap penguasa sehingga tidak ada unsur yang akan mengancam kekuasaan dari penguasa, rakyat takut bukan karena orang lain tetapi takut pada hukum negara, sehingga dia merasa aman seperti tujuan semula.

Thomas Hobbes berharap bahwa prinsip-prinsip Levithannya akan dipraktekkan. Dia melihat kekacauan umum muncul dari dua sumber-nafsu alamiah manusia yang tidak tertekan dan definisi yang saling bertentangan dan membingungkan yang diberikan kepada kata-kata kunci politik. Dihadapkan dengan bahaya bahwa pengajaran kepentingan pribadi dapat mengakibatkan perang semua melawan semua, Hobbes berusaha mencari peranan-peranan yang saling berhubungan bagi pemimpin politik dan filsuf. Golongan yang berkuasa harus menerapkan hukum dan dengan menciptakan rasa takut kekuasaan paksa, mengendalikan nafsu.<sup>25</sup> Disini akan timbul ketertiban umum yang akan mengalahkan ketertiban / kepentingan pribadi.

### 3. Pluralisme Agama

Dalam pandangan Hobbes tentang agama, lebih menitikberatkan pada pembahasan manusia itu sendiri dengan kepercayaan yang tidak akan dicapai dengan kekuatan apapun.<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Charles F. Andrain, *Kehidupan Politik dan Peralatan Sosial Terj. : Luqman Hakim* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1992) 422.

<sup>26</sup>*The Encyclopedia Americana Vol-14* (Dunbury : Glolier Incorporated, 1829) 260.

Namun tuntutan Hobbes adalah bahwa agama merupakan soal hukum dan soal kebenaran ; tujuannya selalu menunjukkan bahwa tidak mungkin kewajiban kita untuk mematuhi Tuhan dapat bertentangan dengan kewajiban kita untuk mematuhi (bagi semua Kristen) penguasa.<sup>27</sup> Doktrin yang diinginkan Hobbes adalah kekuasaan sekuler bagi badan-badan Grejani, tetapi jika keyakinan dan konversi bercampur aduk melebihi apa yang dianjurkan, penguasa haruslah bergerak lebih jauh kearah mengukuhkan kepercayaan yang seragam dari pada yang tampaknya.

Hobbes berusaha menyingkirkan pertimbangan-pertimbangan kitab suci dari politik, dalam rangka menghalangi gereja memiliki kekuasaan politik yang bebas... namun penting jika Hobbes ingin merombak aspirasi-aspirasi mereka yang berfikir bahwa tujuan politik untuk menegakkan kerajaan Tuhan di Inggris. Hobbes mengatakan dalam *Leviathan* dan lain-lain, bahwa tidak ada manfaatnya sesuatu kerajaan dunia dapat dipersamakan dengan kerajaan Tuhan.<sup>28</sup>

Semua agama adalah mengajarkan tentang kebaikan, sehingga Hobbes untuk menyeragamkan perbedaan itu melalui tindakan penguasa. Kebijakanan negara / penguasa tidak mungkin bertentangan dengan agama, jadi jika mereka patuh pada penguasa itu refleksi dari kepatuhan mereka terhadap penguasa yang

---

<sup>27</sup>David Miller, *Politik Dalam ...*, 341.

<sup>28</sup>*Ibid*, 329.

telah dipercaya. Namun jika penguasa bertindak sewenang-wenang dan tidak mengikuti hukum-hukum yang telah disepakati / dibuat maka dapat menggoyahkan kekuasaan / pemerintahan.

Percecokan merangkap dalam perspektif Hobbes itu tidak perlu, karena manusia mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, dan kebebasan dalam berpikir pun harus dijamin, karena manusia tidak akan bisa menembus pikiran orang lain. Yang ditekankan adalah individu harus mematuhi hukum penguasa agar tidak terjadi penyelewengan / pengkianatan, jadi semua tindakan akan beresiko kecil jika melalui jalur hukum, jika tidak menurut Hobbes akan terjadi pelanggaran atas nama agama atau kepentingan pribadi dan terjadi gabungan yang menimbulkan disintegrasi.

Contohnya, di Indonesia adanya parpol yang mengatasnamakan agama dan ayat-ayat Allah untuk kepentingan golongannya, dan menerjemahkan (mengentepresikan) hanya menurut kepentingannya sehingga antar umat beragama terjadi perselisihan yang tidak ada manfaatnya yang justru membuat keresahan dan ketakutan warga masyarakat, sehingga harus ada ketetapan hukum untuk menyeragamkan suatu perbedaan.

Jadi kafabilitas penguasa / pemimpin sangat mempengaruhi roda pemerintahan dan terwujudnya *civil society*. Dalam pandangan Hobbes negara adalah stabil apabila undang-undangnya baik, dan kekuasaan dijalankan dengan

tidak sewenang-wenang ... kualitas undang-undang dan pemerintahan negara seluruhnya tergantung dari kesadaran penguasa.<sup>29</sup>

Penyalahgunaan kekuasaan sangat rawan, jika negara mulai menindas dan membnunui karena masyarakat kehilangan motifasinya untuk tetap taat, sehingga masyarakat akan memilih mati syahid untuk mempertahankan diri dalam melawan kesewenangan.

Hobbes mempunyai dua alternatif taat pada penguasa apapun harganya, atau pembubaran negara dan anarki total.

Dari uraian diatas juga ditinjau dari kaca mata Islam, Allah berfirman :

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ مُؤَيَّدُ الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ حِمْنًا تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُنْزِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (ال عمران : ٢٦)

Katakanlah : *Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, ditangan Engkaulah kebijakan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.*<sup>30</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُلْوَكُمْ فِي مَا تَكْتُمُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (الانعام: ١٦٥)

*"Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia menginginkan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa diajak untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu sesungguhnya Tuhanmu Pengampun dan Maha Penyayang".<sup>31</sup>*

<sup>29</sup>Franz Magnis – Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Gramedia Pustaka Utama, 2001) 212.

<sup>30</sup>QS. 3 : 26.

<sup>31</sup>QS. 6 : 165.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ... (ص: ٢٦)

"Hai Daud sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil ..."<sup>32</sup>

Dengan konsep kekuasaan itu tidak ada lagi pertentangan dengan kekuasaan Allah dan kebutuhan manusia akan adanya pemerintahan. Allah SWT tetap perkedudukan sebagai satu-satunya pemilik segala kekuatan dan kekuasaan itu "didelegasikan kepada nabi Muhammad SAW atau khalifah Allah di bumi mendapat intruksi untuk menegakkan pemerintahan yang adil."<sup>33</sup>

Dalam kondisi yang plural dalam masyarakat, sebagai bukti adanya piagam madinah, yang peraturannya mencakup dan di sepakati oleh perbedaan-perbedaan doktrin agama maupun etnis. Dan keseragaman dari perbedaan tetap terjaga selama mereka mampu menjaga perjanjian tersebut.

Ibnu Taimiyyah yang menyebut pemerintah Islam sebagai "*bayangan Allah di bumi*"<sup>34</sup> jadi segala peraturan yang diciptakan penguasa (khalifah) itu tidak bertentangan dengan agama. Akan tetapi penguasa menyalah menyalahgunakan kepercayaan Allah terhadapnya dan sewenang-wenangan terhadap yang dikuasai maka intergrasi akan terjadi, dalam lingkup negara dan pergelokan minoritas terjadi merobohkan kekuasaan yang besar tadi ; seperti yang dikatakan oleh Hobbes diatas.

Pemberontakan dari golongan-golongan yang merasa dirugikan akan muncul, karena pimpinan / negara tidak mempunyai wibawa, ketegasan, da

<sup>32</sup> *Ibid*, 38 : 26 juga 2 : 30.

<sup>33</sup> Khalid Ibrahim Jindari, *Teori Politik ...*, 74.

tidak adil dalam menyelesaikan masalah. Otoriter secara politis, banyak menguntungkan negara dan masyarakat itu sendiri.

Sebagai contoh ketika selama tiga puluh dua tahun dipegang oleh pemimpin yang otoriter, tegas dan berwibawa, negara dalam keadaan aman, karena adanya kekompakan diantara anggota masyarakat dan penguasa dan ketegasan penguasa. Setiap ada gejolak, akan cepat teratasi sehingga tidak sampai berlarut-larut.

Saat sekarang karena demokrasi yang disalah pahami bebas segala-galanya, ternyata membuahkan suatu kekacauan-kekacauan yang selama ini belum dapat dituntaskan. Ini menandakan bahwa penguasa tidak mempunyai wibawa dan ketegasan dihadapan anggota masyarakat baik dari golongan kelas atas maupun kelas bawah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan kata lain konsep Thomas Hobbes bukan sekedar omong kosong atau teory yang sekedar numpang lewat diantara tokoh-tokoh pemikir besar di barat maupun didunia timur, dalam mewujudkan *Civil society*. Kebijakan-kebijaksanaan yang dikemukakan Hobbes sangatlah tegas dan keras demi menjaga keutuhan bangsa.

### C. Civil Society dan Piagam Madinah

Dalam Piagam Madinah pada dasarnya secara tersirat mengandung nilai-nilai *civil society*. Sehingga dalam kajian ini merupakan analisis piagam madinah terhadap konsep Thomas Hobbes tentang *civil society*.

Dalam mewujudkan *civil society*, Nabi mengadakan suatu perjanjian yaitu Perjanjian Madinah (Madinah Charter). Piagam Madinah merupakan bukti historis bahwa umat Islam mulai bernegara setelah Nabi hijrah ke Yastrib, yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Jadi, asal mula negara dalam Zaman Nabi juga dianut oleh Hobbes dengan adanya perjanjian. Perjanjian Madinah dilakukan karena adanya masyarakat yang majemuk yaitu agama, suku dan berbagai golongan.

Disamping itu secara historis, Rasulullah SAW telah meletakkan dasar-dasar perdamaian (*islah*) yakni pada saat suku-suku besar yang berkuasa pada saat itu saling menanamkan pengaruhnya. Maka dengan adanya peristiwa peletakan *Hajar Aswad* (batu hitam) yang telah bergeser dari tempatnya semula banyak tokoh-tokoh suku yang berpengaruh berupaya untuk dapat meletakkan kembali *Hajar Aswad* tersebut. Akan tetapi Rasul seakan-akan menjadi penengah diantara mereka karena kepribadiannya yang dapat dipercaya atau lebih dikenal dengan sebutan "*al-Amin*". Setelah permasalahan peletakan *Hajar Aswad* dikembalikan pada Muhammad SAW, maka Rasul berinisiatif dengan menggelar sorbannya dan kemudian Rasul meletakkan *Hajar Aswad* tersebut di atasnya, sedangkan para tokoh suku yang berpengaruh pada saat itu diperintahkan untuk memegang di tiap-tiap sudutnya maka diangkatlah *Hajar Aswad* itu dengan sorbannya Rasulullah. Dengan penyelesaian tersebut semua suku merasa puas karena ikut andil dalam peletakan *Hajar Aswad* dan dianggap perbuatan yang cukup adil hingga

semakin terkenal kepribadian Rasul dalam menyelesaikan konflik horisontal yang sekiranya akan terjadi.

Bukti historis lainnya juga dapat dilihat pada saat penyatuan suku *Khajraj* dan *Aus*, dimana Nabi menjadi penengah dengan menanamkan pada diri sahabat untuk menyingkirkan adanya *ta'asubiyah* (kedaerahan) yang kolot bahkan berlebihan. Hingga lahir adanya hadits :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَتَلَ عَلَى عَصِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصِيَّةٍ (رواه ابو داود)

*"Bukan termasuk golongan kami orang yang menyeru kepada ashabiyah, bukan termasuk golongan kami orang yang berperang atas dasar ashabiyah dan bukan termasuk golongan kami orang yang mati karena membela ashabiyah"*<sup>35</sup>

Ini menunjukkan agar tiap-tiap diri khususnya seorang muslim kehadirannya pada suatu komunitas hendaknya menjadi rahmat bagi semua sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk membawa rahmat alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*)

Adapun bukti lain dari perwujudan kontrak sosial dalam perjanjian Madinah adalah sebagai berikut :

*"Kaum Muslimin adalah umat yang bersatu utuh, mereka hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain"*<sup>36</sup>

<sup>35</sup>HR. Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, (Mesir, Musthafa Al-babi al-Halbi wa Auladah, 1952) hal. 14

<sup>36</sup>Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*, 78-79.

Ini menandakan bahwa dalam masyarakat ada berbagai macam keinginan dan kemauan, yang keinginan yang satu dengan yang lain harus hidup bersama-sama yaitu suatu hidup yang ingin saling merugikan antara satu kelompok dengan kelompok lain, dan individu satu dengan individu lainnya. Keadaan tersebut atas inisiatif Nabi harus diadakan suatu kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang mempunyai motifasi berbeda di atas, yaitu perjanjian untuk menghambat tindakan-tindakan yang merugikan satu sama lain dan merugikan diri sendiri, dalam rangka menghindari perang.

Ada beberapa pernyataan Piagam Madinah yang lain yaitu:

"Kelompok Muhajirin yang berasal dari warga Quraisy, dengan tetap memegang teguh prinsip aqidah, mereka bahu-membahu membayar denda baik tebusan bagi pembebasan anggota yang ditawan."

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Bani 'Auf dengan tetap memegang prinsip aqidah..."

"Kaum muslimin yang taat (bertakwa) memiliki wewenang sepenuhnya untuk mengambil tindakan terhadap seorang muslim yang menyimpang dari kebenaran atau berusaha menyebarkan dosa, permusuhan dan kerusakan dikalangan kaum muslimin. Kaum muslimin berwenang untuk bertindak terhadap yang bersangkutan sungguh pun ia anak Muslim sendiri."

"Kaum Yahudi yang mengikuti kamu akan memperoleh pertolongan dan hak persamaan serta akan terhindar dari perbuatan aniya dan perbuatan makar yang merugikan."

"Surat perjanjian ini tidak mencegah (membela) orang yang berbuat aniaya dan dosa. Setiap orang dijamin keamanannya, baik sedang berada di Madinah, kecuali orang yang berbuat aniaya dan dosa. Allah pelindung orang yang berbuat kebajikan dan menghindari keburukan."

Jelas, bahwa pasal-pasal dalam perjanjian tersebut mengatur tatanan warga masyarakat dalam hidup dan kehidupannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kekacauan diberbagai pihak, sehingga masyarakat yang ideal sebagai cita-cita negara tercapai (*civil society*). Perjanjian Madinah dapat dikatakan sebagai peletak dasar suatu kehidupan bernegara, yang tidak hanya menguntungkan salah satu pihak.

Dengan kata lain, jika ada pihak yang melanggar perjanjian, harus dihukum dan tidak dibela oleh perjanjian tersebut. Dimana pada masa itu dalam keadaan yang membahayakan, sehingga harus dikeluarkan Piagam Madinah, agar ada persatuan dan terpecah belah dalam masyarakat Madinah dalam masyarakat yang majemuk. Dalam pasal-pasal tersebut, dalam mengambil tindakan yang seadil-adilnya, sehingga tidak terjadi iri dengki dan dendam yang berlarut larut pada masyarakat.

Negara versi Hobbes memiliki kekuasaan mutlak (*absolut power*), kekuasaannya tidak terpecah belah, karena kekuasaan yang terpecah belah akan mengakibatkan anarkhi, perang sipil dalam negara. Hobbes pun tidak menyangkal bahwa kekuasaan absolut bisa melahirkan despotis. Negara akan bertindak sewenang-wenang tanpa ada satu pun kekuatan yang mampu mengontrolnya. Namun demikian menurut Hobbes, negara despotis itu masih jauh lebih baik dari pada terjadi anarkhi akibat terbelahnya kekuasaan negara.

Obsesi Hobbes terhadap negara kekuasaan memiliki alasan yang cukup mendasar. Karena telah bergelut dengan berbagai pergolakan dan pahit getirnya dalam kehidupannya. Yaitu terobsesinya Hobbes untuk menemukan solusi untuk menghindari perang dan konflik politik serta menciptakan perdamaian. Dengan kontrak sosial (*covenant*) akan muncul negara yang absolut yang sebagai *leviathan* kejam, ditakuti dan kuat, sehingga ada kepatuhan (*obidience*), dari rakyat terhadap penguasa.

Piagam Madinah merupakan alat untuk mewujudkan *civil society* jika ditinjau dari filsafat sosial, bahwa dari gejala masyarakat yang terjadi pada realitas sosial adalah untuk menciptakan perdamaian antara individu dengan individu dan individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok dalam suatu masyarakat. Jika dalam konsep Hobbes adalah sebagai peredam konflik karena adanya perjanjian yang disepakati oleh manusia atau anggota masyarakat. Maka Piagam Madinah merupakan wujud dari kontrak sosial yang merupakan langkah awal dalam membentuk negara dalam mewujudkan *civil*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

*society*. Dengan demikian kepala negara yang diserahi hak dari masing-masing individu harus merupakan penengah yang adil, bijaksana dan berwibawa. Karena dengan kepemimpinan atau penengah(penguasa) seperti tersebut di atas akan timbul kepatuhan dari rakyat. Teori Hobbes sangat berperan dalam mengatur masyarakat yang masih liar yaitu yang dilanda kekacauan dan keresahan yang masing-masing menginginkan kekuasaan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa :

##### 1. Tujuannya dan Civil Society

Konsep *civil society* yang dirumuskan Thomas Hobbes berawal dari pandangan tentang manusia sebagai makhluk atau mesin anti-sosial yang bermasyarakat (membentuk ikatan sosial) karena dorongan mekanistik saja. Pada intinya civil society adalah membentuk masyarakat aman dan damai dengan pembatasan-pembatasan hukum sebagai penguat kontrak sosial. Hukum (perjanjian sosial) ini dapat menghalangi kondisi alamiah manusia yaitu rasa takut, cemas, dan tidak terhadap satu sama lain yang akibatnya perang semua melawan semua dan *homo homini lupus* diantara sesamanya. Bahwa manusia dalam keadaan bebas, mustahil akan terwujud *civil society*. Jadi *civil society* menurut Hobbes adalah wujud negara yang kokoh dengan kekuasaannya yang didukung oleh perangkat / aparat negara yang baik dan tangguh dengan hukum (UU) yang mengatur masyarakat (*civil law*) dan melindungi hak milik masyarakat walaupun negara mempunyai kekuasaan yang absolut dan otoriter, sehingga ada pengendalian diri dari individu karena tercipta masyarakat yang beradab, aman dan bahagia serta adil. Adapun tujuan

civil society dalam konsep Hobbes adalah membentuk masyarakat yang aman, bahagia dan adil.

## 2. Proses Civil Society

Adapun proses terbentuknya *Civil Society* dalam pandangan Hobbes adalah bermula dari tabiat manusia yang selalu ingin berkuasa, takut dan cemas (dalam *state of nature*) secara mekanistik manusia ingin berdamai dan bahagia sehingga dari perang semua melawan semua akan merubah atau diubah oleh individu-individu itu sendiri (dengan inisiatif mereka) yaitu dengan akalny mereka dengan bijaksana mengadakan perjanjian (kontrak sosial) (*social contract*) yang menghasilkan hukum sipil (*civil law*) yang dilakukan antara rakyat dengan rakyat dan memilih penengah (penguasa) yang mempengaruhi roda pemerintahan, harus memadahi pengetahuannya. Hal itu merupakan langkah awal menuju *civil society*, yaitu Aman, tentram, bahagia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## 3. Pandangan Islam terhadap Civil Society

Ide untuk membentuk civil society merupakan suatu kenyataan ketika Nabi Muhammad pada waktu itu mengeluarkan Perjanjian Madinah. Namun ketika setelah Nabi wafat *civil society* itu mulai tergilas oleh kepentingan kepentingan individu yang menginginkan kekuasaan dan menanamkan pengaruhnya terhadap umat Islam dan umat lainnya. Umat Islam mau membentuk masyarakat yaitu mempunyai tujuan yaitu ingin aman, tenteram dan bahagia sebagaimana tujuan dalam masyarakat islam yakni suatu masyarakat yang aman, tentram dan damai dalam ridlo Allah swt.

## B. Saran – Saran (Implikasi)

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan diakhir studi yang monumental ini adalah :

1. *Civil society* dalam penulisan ini yang didiskripsikan secara ilmiah belum merupakan pembahasan yang final namun tidak menutup kemungkinan masih adanya kekurangan-kekurangan yang terbuka untuk dikritisi oleh pihak lain.
2. Ada sub-sub masalah yang terkait dengan konsep, proses, maupun padanan konsep dalam Islam misalnya *civil society* dalam kaitannya dengan terapan praktis dalam masyarakat Islam, atau manusia sebagai alat-alat mekanistik yang perlu ditentramkan dalam pandangan Hobbes ditinjau dari pandangan Isla, yang merupakan masalah-masalah yang menarik untuk diteliti oleh yang mempunyai perhatian untuk meneliti. Dan masalah-masalah tersebut tidak termasuk dalam pembahasan penulis yang lebih mendalam.

*Civil Society* dalam pandangan Hobbes harus dipahami secara positif dalam suatu masyarakat (negara). Walaupun banyak filosof atau pemikir politik mengancam pemikirannya, bahwa teorinya hanya mitos, tidak ada dalam kenyataan, jika dicermati secara filosofis hermeneutik ternyata konsep Thomas Hobbes tentang *civil society* ada kemungkinan besar untuk diterapkan dalam masyarakat. Yang mana masyarakat sekarang memerlukan ketenangan dan keadilan, juga keamanan dan kebahagiaan lahir batin.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sehingga, inilah kiranya implikasi yang lebih kita temukan dalam kajian ini apabila, para pembaca yang budiman ingin melanjutkan penelitian itu, secara lebih mendalam *exploratif*.

Ada kemungkinan penulisan ini, tidak sejalan dengan pemikiran pembaca, itu memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Selamat meneliti.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ahmad. 1975. *Etika (Ilmu Akhlak)*. Terj. Farid Ma'ruf. Jakarta: Bulan Bintang.
- Andrain, Charles F.. 1992. *Kehidupan Politik dan Peralatan Sosial*, Terj. Lukman Hakim. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Arifin, Syamsul. 2000. *Merambah Jalam Baru Islam*. Yogyakarta ITTQA-Press.
- Bagus, Lorens. 1966. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Baso, Ahmad. 1999. *Civil Society Versus Masyarakat Madani*. Pengantar Muhammad AS. Hikam dan Nurcholish Madjid. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Berten, K.. 1980. *Ringkasan Sejarah Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Borgatta, Edgar F. tt. *Encyclopedia of Sociology*. New York: Macmillan Library Ilus.
- Campbell, Tomm. 1994. *Tujuh Teori Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Cole, Barbara Letta. 1993. *The Encyclopedia Americana Vol-14*. Danbury: Grolier Incorporated.
- Ensiklopedia Umum*. Yogyakarta: Kanisiaus. 1991
- Forma*, Edisi XIX/Th.X/1996.
- Fromm, Erich. 1997. *Lari Dari Kebebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gazalba, Sidi. 1983. *Islam dan Perubahan Sosio-Budaya: Kajian Islam tentang Perubahan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Gordon, H.Scot. 1991. *A History and Philosophy of Social Science*. London: Routledge.
- Hadi, P. Hardono. 1996. *Jati Diri Manusia*. Yogyakarta: Kanisius.

- HR. Abu Dawud. 1952. *Sunan Abu Dawud*, Juz II. Mesir: Musthafa Al-Babi al-Halbi Wa Auladah.
- Hadiwijono, Harun. 1980. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hartoko, Dick. 1995. *Kamus Populer Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasbi, H. Artani. 1999. *Diktat Kuliah Filsafat Akhlak*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Herrycahyono, Cheppy. 1991. *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Hikam, Muhammad AS. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Hobbes, Thomas. 1986. *Leviathan*. Chicago: The Western World.
- Hook, Sidney. 1994. *Sosok Humanis Demokrat Tradisi Pragmatisme Sebuah Bunga Rampai*. Ed. Paulkurts. terj. Ignatius dan Evi Mahaningtyas. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hutahuruk. 1993. *Azas-azas Ilmu Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Isjwara. 1985. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Bina Cipta.
- Jindan, Khalid Ibrahim. 1999. *Teori Politik Islam: telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Madjid, Nurcholish. 1999. *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina.
- Marshall, Gordon (Ed). 1998. *Dictionary of Sociology*. New York: Oxford University Press. 1998.
- Magnis-Suseno, Franz. 1992. *Berfilsafat dalam Konteks*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- , 1992. *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.
- , 1995. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia Putaka Utama.
- , 2001. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Miller & Larry Sciendentop, David. 1986. *Politik dalam Perspektif*. Jakarta: Rajawali.
- Mudjib, Abdul. 1999. *Fitrah dan Kepribadian suatu Pendekatan Psikologis*, pengantar Zakiah Daradjat. Jakarta: Darul Fallah.
- Nasr, Sayyed Hussein. 1995. *Menjelajah Dunia Modern*. Bandung: Mizan.
- Noer, Dilliar. 1982. *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*. Bandung: Mizan.
- Norton, Peter B. 1994. *The New Encyclopedia Britannica*. Chicago: Encyclopedia Britannic.
- Piscastoris, James dan F. Eicklman. 1998. *Ekspresi Politik Moslem*, Terj. Rofik Suhud. Jakarta: Mizan.
- Poespoprodjo, W. 1999. *Filsafat Moral*. Bandung: Pustaka Grafika.
- Poloma, Margaret M. 2000. *Sosiologi Kontemporer*. Terj. Tim Penerjemah Vasoma.-Ed. II. Cet.-4. Jakarta: Grafindo Persada.
- Prent C.M, K Dkk. 1969. *Kamus Latin Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Putuhena, M. Husni. 1999. *Tragedi Kemamusiaan dalam Kerusuhan di Maluku*.  
Ambon: IEMM.
- Raharjo, Dawam. 1999. *Masyarakat Madani di Indonesia: Sebuah Penjajakan Awal*.  
Jurnal Pemikiran Islam Vol. 1. Jakarta: Paramadina.
- Sabine, G.H.. 1981. *Teori-teori Politik 2*, Terj. Soerwarno Hadiatmodjo. Bandung: Bina Cipta.
- Seligman, Edwin R.A. tt. *Encyclopedia of The Social Sciense*. Vol. III-VIII. New York: The Macmillan Company MCM.
- Sjadzali, HA. Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sufiyanto. 2001. *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutik Masyarakat Madani Nurcholish Madjid*. Pengantar Ahmad Jaenuri. Yogyakarta: Pustaka Pelajar LP2IF.

Sugiharto, Bambang. 1999. *Post Modernisme Tantangan Bagi Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.

Sugiyono. 1998. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Suhelmi, Ahmad. 1999. *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta: Darul Fallah.

Syamsuddin, M.Din. 2000. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Logos.

*The World Book Encyclopedia*. Vol. 9. Chicago: World Book, Inc. 1986.

Tim Penulis Rosda. 1995. *Kamus Filsafat*. Pengantar Jalaluddin Rahmat. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Veeger, K. J. . 1993. *Realitas Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Wuisman, J.J.J.M. 1996. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI-Press.